



KADIN *NEWS*

VOL. 5 | DESEMBER 2023

JAKARTA | 7 DESEMBER
SWISSOTEL PIK

SIDANG PLENO

Rapimnas Kadin 2023

Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh,
Menuju Indonesia Emas 2045

Penganugerahan Kadin Impact Award 2023

Persiapan Dialog Capres Bersama Kadin:
Kolaborasi dengan tvOne

Kabar Terkini
Outlook Peraturan Tahun 2024: Harapan untuk
Perbaikan dan Pengembangan yang Lebih Baik

Wawancara Eksklusif
dengan Tony Wenas

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Indonesia
dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia

Opini Pengurus Kadin Indonesia: Industri Olahraga
Irawadi D. Hanafi

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Olahraga Kadin Indonesia

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia	Program Pengurus	03
43	Manfaat Keanggotaan Kadin	Inisiatif Internal	06
44	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi/Media	09
45	Fitur Terbaru Website Kadin	Kunjungan Internasional	17
46	Kabar Terkini: Outlook Peraturan Tahun 2024: Harapan untuk Perbaikan dan Pengembangan yang Lebih Baik	Penandatanganan Nota Kesepahaman	21
62	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	Menuju Dialog Capres Bersama Kadin: Seri Indonesia Business Forum tentang Indonesia Emas 2045	22
63	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Wirausaha	Special Section: Rapimnas Kadin 2023	24
64	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	Special Section: Malam Penghargaan Kadin Impact Award	33
65	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	Kaleidoskop Kadin: Satu Tahun Kadin Indonesia Sepanjang 2023	36
		Silaturahmi Sekretariat Kadin Indonesia	37
		Wawancara Eksklusif dengan Tony Wenas Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Indonesia dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia	38
		Opini Pengurus Kadin Indonesia: Industri Olahraga Irawadi D. Hanafi WKU Bidang Industri Olahraga Kadin Indonesia	40

SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Dengan program kerja yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan, kami yakin dapat mendekatkan Indonesia pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Assalamu alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua

Tahun 2023 telah kita lalui dengan baik. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga banyak kegiatan dan agenda penting Kadin Indonesia telah sukses terlaksana selama bulan Desember.

Salah satu agenda penting di bulan Desember adalah penyelenggaraan agenda tahunan Rapimnas 2023. Gelaran Rapimnas tahun ini mengusung tema “Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang terfokus pada penguatan perekonomian Indonesia dalam memasuki tahun pesta demokrasi dan menuju Indonesia Emas 2045.

Rapimnas 2023 menggarisbawahi posisi dan komitmen Kadin Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024 dengan fokus pada empat pilar utama organisasi demi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Dengan program kerja yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan, Kadin yakin dapat mendekatkan Indonesia pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Selain hasil Rapimnas, *newsletter* edisi kelima ini juga menyoroti penyelenggaraan Kadin Impact Award 2023 yang memberikan penghargaan kepada 15 Kadin Daerah yang telah menjalankan program untuk mengembangkan perekonomian daerah.

Newsletter edisi kali ini juga merangkum seluruh kegiatan Kadin Indonesia di bulan Desember 2023, termasuk *pre-event* Dialog Capres Bersama Kadin, hasil kerja sama dengan tvOne

Saya mewakili keluarga besar Kadin Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Selamat Tahun Baru 2024! Kami berharap kerja keras, kegiatan, dan dampak positif yang telah dihadirkan oleh Kadin Indonesia dapat tersampaikan dengan baik melalui *newsletter* ini untuk diketahui Bapak/Ibu dan menjadi referensi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Salam,

Yukki Nugrahawan Hanafi

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



PROGRAM
PENGURUS



PROGRAM
INTERNAL



KEGIATAN BERSAMA
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA



RAPIMPROV



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN



INDONESIA BUSINESS FORUM
SERI INDONESIA EMAS 2045:
PRE-EVENT DIALOG CAPRES
DENGAN KADIN



SPECIAL SECTION:
RAPIMNAS KADIN 2023



SPECIAL SECTION:
MALAM PENGHARGAAN
KADIN IMPACT AWARD

PROGRAM PENGURUS

Rapimprov Kadin Kepulauan Riau Dukung Pemerataan Investasi di Riau

Melanjutkan rangkaian penyelenggaraan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) di berbagai wilayah di Indonesia, kali ini, Kadin Provinsi Kepulauan Riau berkesempatan untuk menyelenggarakan Rapimprov pada 5 Desember 2023. Rapimprov ini mengusung tema "Mengembalikan Keharmonisan Pengusaha dan Pemerintah Melalui Kepastian Hukum dalam Berinvestasi di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepri".



Rapimprov dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatra, Teuku Zulham. Salah satu agenda utama adalah bedah buku sekaligus penyerahan buku Indonesia Emas 2045 kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Gelaran Rapimprov ini sekaligus menjadi momen yang mempertemukan perwakilan pengurus Kadin Indonesia, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), DPRD, serta Ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau.

PROGRAM PENGURUS

Rapimprov Lampung Fokus pada Pengembangan SDM menuju Indonesia Emas 2045

Sebagai wujud konkret penguatan organisasi dan sinergi dengan seluruh Kadin Daerah, Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) terus dilakukan di berbagai provinsi. Kali ini, Kadin Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapimprov pada 18 Desember 2023 dengan tema “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Inklusif, dan Kolaboratif dari Lampung untuk Indonesia Emas 2045”.



Mewakili Kadin Indonesia, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi hadir dan dalam sambutannya menekankan bahwa Lampung sangat strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, mengingat Lampung memiliki potensi peluang investasi, infrastruktur yang baik, sehingga berpotensi menjadi salah satu pusat ekonomi di Sumatra.

Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung, M Kadafi mengatakan, Rapimprov dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk mendorong sinkronisasi, mengkomunikasikan semua program, serta menggali potensi dan sumbangsih saran kepada pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam Rapimprov adalah sesi bedah buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 bersama Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Eka Sastra. Agenda bedah buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus Kadin Provinsi Lampung dan pelaku usaha di Lampung tentang peran mereka dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Rapimprov juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan serta partisipasi aktif guna mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di Indonesia.



PROGRAM PENGURUS

Rakornas Tiga Bidang Garisbawahi Pentingnya UMKM Naik Kelas

Sinergi antara peningkatan ekspor hasil industri dan pertanian untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM. Adanya kolaborasi yang sinergis antara sektor industri dan pertanian dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM di negara ini.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung UMKM dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan memperkuat sinergi antara industri dan pertanian untuk UMKM, Indonesia dapat lebih efektif memanfaatkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan ekspor, dan memperkuat posisinya di pasar internasional.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah, pengurus Bidang Pertanian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian melaksanakan Rakornas dengan tema “Sinergi Peningkatan Ekspor Hasil Industri dan Pertanian untuk UMKM Naik Kelas” pada 1 Desember 2023. Rakornas ini merumuskan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya peningkatan produktivitas dan daya saing dalam rangka peningkatan kinerja ekspor, serta penyusunan program kemitraan, investasi dan hilirisasi untuk mendukung UMKM dan petani.



Beberapa hasil dari Rakornas Tiga Bidang ini termasuk, kesepakatan untuk mendorong intensifikasi kerja sama antara tiga pilar utama penyumbang PDB terbesar Indonesia (55% untuk gabungan sektor perdagangan, pertanian dan perindustrian) hingga pengejaran target PDB sebesar 3 triliun USD di tahun 2035. Beberapa kebijakan yang dibahas dalam rapat kali ini termasuk pembukaan akses pasar baru ke Tiongkok, hilirisasi produk pertanian unggulan seperti rumput laut, *crude palm oil* (CPO), dan produk turunannya, serta sinkronisasi pasokan bahan baku untuk kebutuhan Industri.



Diskusi ini juga melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi UKM RI Hanung Harimba Rachman, Kepala Pusat Sosial Ekonomi Pertanian Sudi Mardianto, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri, Wakil Menteri Pertanian (2009–2011) dan Wakil Menteri Perdagangan (2011–2014) Bayu Krisnamurthi. Turut hadir pula Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Arif P Rachmat, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe.

PROGRAM INTERNAL

Kadin Indonesia Ajak Masyarakat Bangkit menjadi Bangsa Pemenang dalam Perayaan Hari Natal 2023



Kadin Indonesia merayakan momen istimewa Natal dengan penuh sukacita dan kehangatan pada 16 Desember 2023 di Gereja Immanuel, Jakarta.



Dengan mengusung tema 'Bangkitlah Indonesia menjadi Bangsa Pemenang', Kadin Indonesia menegaskan keyakinannya akan peran penting dalam membangkitkan semangat dan kemajuan dunia usaha serta perekonomian nasional. Pesan Natal juga menggarisbawahi kolaborasi, inovasi, dan semangat kebangkitan adalah kunci untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang.

Perayaan Natal Kadin Indonesia juga dipandang sebagai momentum untuk merayakan persatuan, semangat kebersamaan, dan komitmen serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Melalui semangat kebangkitan dan harapan yang menyala, Kadin Indonesia siap menjadi agen perubahan guna mencapai Indonesia Emas 2045.

PROGRAM INTERNAL

Kadin Indonesia Gelar Forum Diskusi Post COP 28: Fokus Bahas Komitmen Bantuan Pembiayaan Energi Terbarukan

Kadin Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip keberlanjutan, perwakilan pengurus Kadin Indonesia menghadiri COP 28 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023-12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. COP 28 sendiri merupakan konferensi tingkat tinggi yang menghasilkan perjanjian-perjanjian dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Usai menghadiri COP 28, perwakilan pengurus Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani, bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, dan Ketua Kadin Net Zero Hub Dharsono Hartono menyelenggarakan post event briefing dengan mengundang anggota termasuk dari asosiasi sektoral terkait.



Sedikitnya terdapat empat Pilar Agenda Aksi Presidensi dalam COP 28, yaitu mempercepat transisi energi, memperbaiki pendanaan iklim, berfokus pada manusia, kehidupan, dan mata pencaharian, serta mendukung seluruh kegiatan dengan inklusivitas sepenuhnya. Kadin Indonesia turut menjadi bagian dari upaya promosi dan menyambut baik adanya komitmen pembiayaan dengan nilai total USD 83,76 miliar atau setara Rp1,3 kuadriliun.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani optimis bahwa pembiayaan yang ada dapat membawa imbas yang cukup besar dalam akselerasi penanganan perubahan iklim.

(lanjutan di halaman 8)



“Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi sektor usaha melalui peningkatan investasi hijau. Program pembiayaan climate finance salah satunya hadir untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga sektor pengembangan energi terbarukan, serta pendanaan khusus untuk membantu negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim,” terangnya.



United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar investasi dalam energi terbarukan mengalir ke negara-negara maju, sekitar tiga perempat dari semua pembiayaan investasi internasional dalam energi terbarukan pada tahun 2022 mengalir ke Eropa. Sementara itu, negara-negara berkembang hanya menciptakan peningkatan proyek energi terbarukan sebesar 1 persen setiap tahun sejak 2015.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, turut menjelaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk membangun dialog dan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu kunci dari keberhasilan target emisi Indonesia adalah tersedianya pendanaan iklim yang berpijak di atas azas keadilan, serta mendukung keperluan Indonesia untuk terus tumbuh tangguh,” ujar Rachmat.

Selain itu, Ketua Kadin Net Zero Hub, Dharsono Hartono mengatakan, jika biaya yang dibutuhkan untuk mencapai transisi energi hijau memang besar. “Tugas kita sekarang adalah melakukan follow-up dengan adanya komitmen dana yang akan digelontorkan untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Gelar Workshop untuk Dukung Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia



Kadin Indonesia memegang komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mempersiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antar Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) terkait, Kadin Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan workshop Bimbingan Teknis Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Workshop ini diharapkan dapat mendorong kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas dan daya saing mereka. Hal ini mengingat UMKM sebagai sektor dominan yang memerlukan perhatian khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker RI Muhammad Ali, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahan Hanafi, serta Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kadin Indonesia Adi Mahfudz, turut serta dalam acara tersebut.

Workshop ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari Pengurus Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Wakil Ketua Umum Ketenagakerjaan Kadin Provinsi Kabupaten/Kota, dan Pengurus Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin. Bimtek Pemagangan juga menghadirkan pemateri dari Kementerian Ketenagakerjaan.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kerja Sama Kadin Indonesia dan Kominfo, Dorong Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada tahun tersebut.



Target talenta digital
Indonesia

9 Juta

pada tahun 2030

sumber: kominfo.go.id

Sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan talenta digital di Indonesia, Kadin Indonesia melakukan kerja sama dengan Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama terkait sinergitas ekosistem digital yang dilakukan bagi pengembangan talenta digital Indonesia pada 11 Desember 2023.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, dan Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika, Hary Budiarto, di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup upaya dalam mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia digital sesuai standar Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Komitmen Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi dan Sinergi Bersama Menuju Kemajuan

PBB menyoroti hubungan antara antikorupsi, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Sebagai negara yang aktif dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia berperan dalam memperingati hari ini sebagai komitmen dalam pemberantasan korupsi. Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember diperingati sebagai upaya bersama negara-negara untuk melawan korupsi, menekankan peran Konvensi PBB Antikorupsi, dan meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi.

Bidang Hukum & HAM bersama dengan Badan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Indonesia turut serta dalam momen bersejarah dengan menghadiri pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 12 Desember 2023, yang diselenggarakan dengan megah di Istora Gelora Bung Karno. Presiden RI dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan acara ini dengan tema "Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".

Tokoh-tokoh penting seperti Guru Besar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, serta Gubernur Provinsi Aceh dan Papua turut memperkaya acara ini dengan paparan inspiratif mereka. Kebersamaan mereka menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadapi tantangan korupsi demi mewujudkan kemajuan Indonesia.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Program Magang Campus Leaders Batch 7: Kadin Indonesia dan Bakrie Center Foundation Berkontribusi 1,4% dari Target Nasional Eliminasi TBC

200 mahasiswa TB Rangers (sebutan untuk mahasiswa magang peserta program) dalam program Magang Campus Leaders angkatan ketujuh merayakan kelulusannya dengan mempresentasikan hasil magang melalui prosiding atau publikasi artikel ilmiah pada 20 Desember 2023. Prosiding yang dipresentasikan oleh TB Rangers menunjukkan hasil magang untuk menanggulangi penyakit Tuberculosis (TBC) di enam wilayah provinsi yaitu Sumatra Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

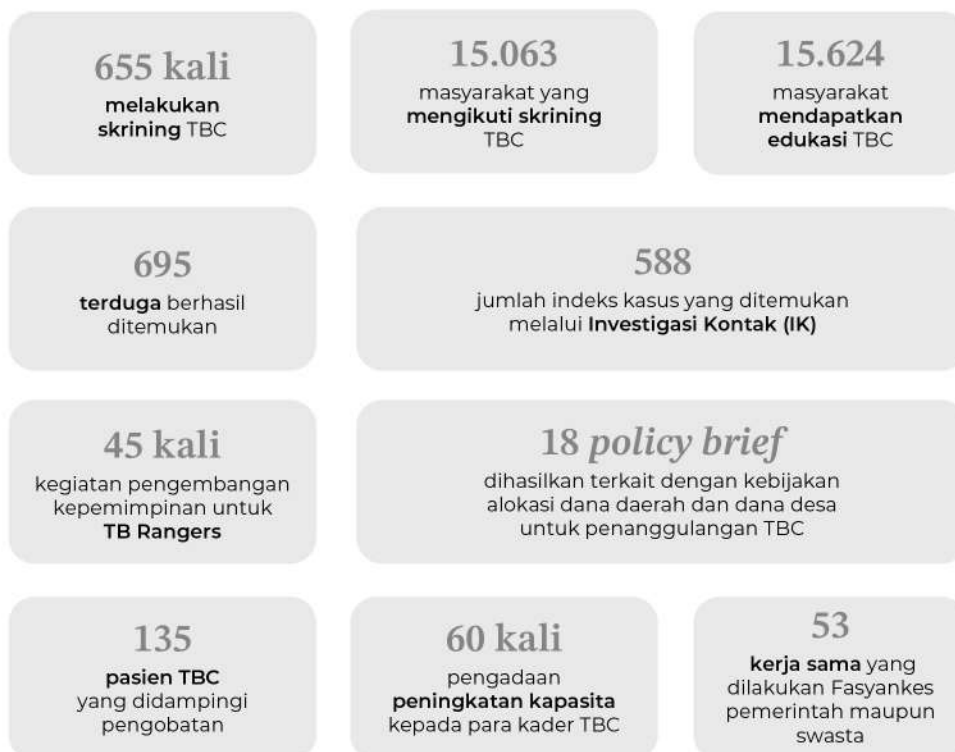
(lanjutan di halaman 12)

Paparan prosiding ini juga merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, serta mentor dari lembaga mitra magang. Program Magang ini didukung penuh oleh Kadin Indonesia sebagai perwakilan dan pelopor pihak dunia usaha untuk percepatan eliminasi TBC.

Graduation day TB Rangers Campus Leaders Program 7 dibuka oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, dan CEO Bakrie Center Foundation.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program Magang Campus Leaders ketujuh ini. "Kadin Indonesia berharap pencapaian dalam program ini dapat kita pertahankan atau bahkan tingkatkan, sehingga dapat mempercepat eliminasi TBC di Indonesia sebelum tahun 2030. Eliminasi TBC merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan. Salah satu faktor penting untuk mencapai visi tersebut adalah memiliki sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, Kadin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda, untuk turut berpartisipasi dalam upaya eliminasi TBC."

Dalam Campus Leaders Program 7, isu Tuberkulosis menjadi tema utama dalam pelaksanaan Magang. Selama 1 semester yang terhitung dari bulan Agustus hingga Desember 2023, lembaga mitra magang bersama TB Rangers berkontribusi sebesar 1,4 persen dari target nasional dengan rincian sebagai berikut:



(lanjutan di halaman 13)

Capaian ini diapresiasi oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk pengentasan TBC di Indonesia.

“Indonesia masih menduduki posisi kedua sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Estimasi angka kasus TBC saat ini sekitar 1.060.000 kasus. Dukungan untuk proses mengeliminasi TBC juga penting hadir dari generasi muda. Kalian merupakan *agent of change*. Mari kita satukan tekad dan semangat untuk mewujudkan Indonesia bebas Tuberculosis, jelasna saat hadir dalam memberikan sambutan secara daring.

Program Magang Campus Leaders juga tercatat sebagai magang yang setara dengan program Kemendikbud Ristek yaitu Kampus Merdeka. Menurut Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Ristek RI, Sri Suning Kusumawardani, program semacam ini tidak hanya mengasah *hard skill* yang dibutuhkan di dunia kerja/industri, namun juga keterampilan *soft skill* yang tidak kalah pentingnya.



“Berdasarkan kajian World Economic Forum di tahun 2023, ada beberapa *soft skill* yang dibutuhkan di dunia industri saat ini antara lain adalah *leadership*, *social influence*, dan empati. Melalui magang Campus Leaders Program, saya percaya bahwa para mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan *leadership*, *social influence*, dan empati,” ungkapnya.

Sebagai penutup, CEO Bakrie Center Foundation, Jimmy Gani, menyampaikan bahwa isu TBC ini perlu ditangani oleh berbagai pihak. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor sangat penting untuk dilakukan untuk mempercepat eradikasi TBC.

“Kesehatan merupakan salah satu pilar dalam target capaian Sustainable Development Goals. Indonesia ditargetkan untuk mencapai eliminasi pada tahun 2030. Namun, dengan konsep percepatan dan melalui kolaborasi hexa helix melalui Campus Leaders Program, BCF dan Kadin Indonesia berupaya agar eliminasi dapat mencapai target, bahkan dilakukan sebelum tahun 2030,” jelas Jimmy.

Program magang untuk percepatan eliminasi TBC ini akan berlanjut di tahun 2024. Untuk semester pertama yang akan dimulai pada Februari 2024, terdapat 30 ribu mahasiswa yang telah mendaftar. 450 posisi terbuka bagi mahasiswa yang tertarik untuk menjadi TB Rangers. Harapannya, keterlibatan pemuda dalam penyelesaian isu sosial seperti TBC semakin besar, disertai dukungan dari berbagai pihak.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Resmi Ditutup, TEI 2023 Lampau Target dengan Potensi Transaksi Capai USD 30,5 Miliar



Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 telah terselenggara secara sukses melalui format hybrid sejak 18 Oktober hingga 18 Desember 2023 di International Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten.



Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yurki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Didi Sumedi resmi menutup gelaran TEI 2023 di Kantor Kementerian Perdagangan pada tanggal 20 Desember 2023.

Transaksi yang tercatat dalam TEI 2023 sebesar 30,5 miliar dollar AS atau senilai Rp 472,8 triliun. Transaksi ini merupakan nilai total dari transaksi daring, luring, dan investasi. Capaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 11 miliar dollar AS.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengungkapkan, "Di tengah berbagai tantangan global yang membayangi, diantaranya perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut serta pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat setelah pandemi, kita berhasil menunjukkan pada dunia bahwa kinerja ekspor mampu bertahan dan ekonomi Indonesia terbukti tangguh."

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia pada Simposium Demokrasi: Iklim Investasi Kondusif dan Pemanfaatan Bonus Demografi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mempersiapkan masyarakat menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang, maka Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia menyelenggarakan kegiatan Simposium Demokrasi dengan tema 'Pemilu Damai, Investasi Tumbuh untuk Indonesia Maju' pada 23 Desember 2023.



Untuk membahas berbagai aspek terkait pemilu damai, investasi, dan pembangunan Indonesia, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menghadiri Simposium Demokrasi dengan tema 'Pemilu Damai, Investasi Tumbuh untuk Indonesia Maju', pada 23 Desember 2023. Yukki menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif serta pemanfaatan bonus demografi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Simposium Demokrasi ini juga ikut dihadiri oleh Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang menyampaikan pentingnya menjaga pemilu damai bagi peningkatan investasi di Indonesia.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/ASOSIASI/MEDIA

Kadin Indonesia Optimis dan Realistis Melihat Perekonomian Indonesia di Tahun 2024

Sebagai satu-satunya payung utama organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif menyuarakan pandangan dan strategi para pelaku bisnis di hadapan publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa perwujudan konkret komitmen tersebut adalah pada program Power Lunch CNBC yang ditayangkan pada 27 Desember 2023 dimana Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, membahas strategi para pelaku usaha dalam menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan era suku bunga tinggi yang diperkirakan akan berlanjut hingga semester II 2024.



Pada kesempatan ini, Kadin Indonesia memberikan pandangan terkait pengelolaan risiko ekonomi, optimalisasi sumber daya, dan eksplorasi peluang bisnis yang muncul di tengah dinamika perekonomian menyambut tahun 2024 mendatang.

Di lain hari, pada 29 Desember 2023, Yukki membahas *outlook* dunia usaha dan ekonomi pada tahun 2024 mendatang dalam program Investor Daily Talk di IDTV.

Kadin Indonesia optimis dan realistis melihat perekonomian Indonesia pada tahun 2024, meskipun banyak tantangan ketidakpastian global.

Untuk menyaksikan talkshow ini, Anda dapat mengaksesnya melalui YouTube IDTV dengan kata kunci pencarian 'Outlook Bisnis 2024 di Indonesia - Investor Daily Talk'.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

ASEAN-JAPAN Young Business Leaders' Summit 2023: Perkuat Kerja Sama ASEAN dan Jepang



Jepang merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga di ASEAN. Keterangan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan, volume perdagangan ASEAN dan Jepang pada tahun 2023 mencapai USD 1,1 triliun atau meningkat 2,3 persen dari tahun sebelumnya.

PERDAGANGAN INDONESIA - JEPANG
JANUARI - DESEMBER 2023**EKSPOR**
Indonesia ke Jepang

MIGAS	NON-MIGAS
USD 1,7 Miliar	USD 23,2 Miliar

39,01% (yoy)

USD 24,8 Miliar**IMPOR**
Indonesia dari Jepang

MIGAS	NON-MIGAS
USD 0,1 Miliar	USD 17,1 Miliar

17,29% (yoy)

USD 17,2 Miliar

Neraca Perdagangan Indonesia - Jepang
pada periode tahun 2022 mengalami
Surplus USD 7,7 Miliar

Sumber: Indonesia Trade Promotion Center

Dalam rangka memperingati setengah abad hubungan persahabatan dan kerja sama yang terjalin, ASEAN dan Jepang menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun hubungan pada 16-17 Desember di Tokyo, Jepang.

Keterlibatan Kadin Indonesia dalam gelaran ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato, yang hadir mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, dalam sesi ASEAN-Japan Generation Z Business Leaders Summit 2023.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia turut memberikan rekomendasi peluang kerja sama yang dapat dieksplor untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dan Jepang. Pada kesempatan ini, Kadin Indonesia juga turut memperkenalkan program Wiki Entrepreneur sebagai salah satu program strategis bagi ASEAN dan Jepang.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Kadin Indonesia Terus Buka Akses Pasar Non Tradisional

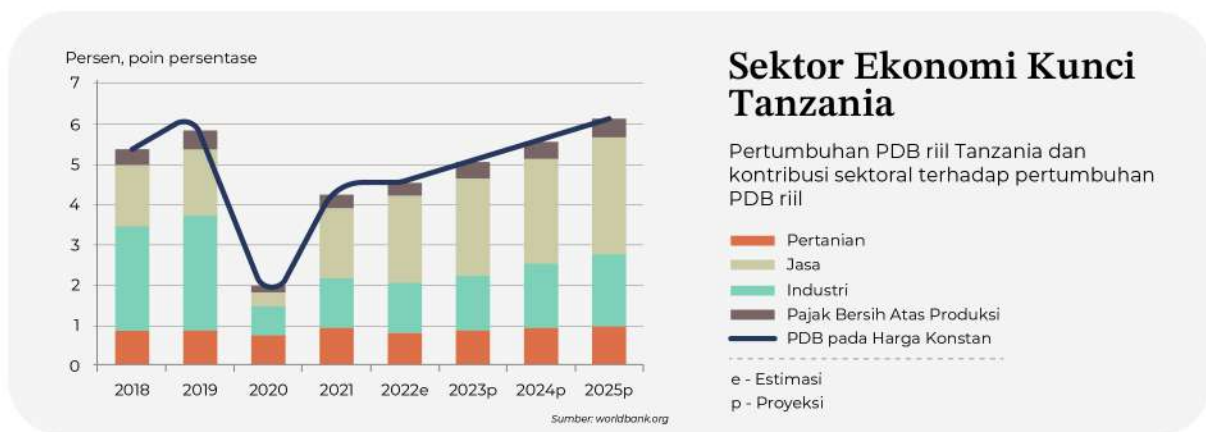
Kadin Indonesia terus berkomitmen memperkuat iklim ekonomi di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong keterbukaan akses ke pasar non tradisional. Pasar non tradisional sendiri merupakan negara-negara yang potensial secara ekonomi dan prospektif untuk menjadi tujuan ekspor baru bagi Indonesia.

Negara-negara ini terdiri dari sembilan negara yang tersebar di berbagai kawasan, seperti kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, Afrika, Asia Selatan dan Tengah dan Pasifik Selatan.

Terkait dengan upaya meningkatkan akses pasar non tradisional, di bulan Desember, Kadin Indonesia menerima lawatan dari beberapa negara:

Tanzania: Eksplorasi Peluang Kerja Sama dan Investasi dalam Business Meeting

Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif pemerintah guna memperkuat hubungan bilateral dengan Tanzania, Kadin Indonesia mengadakan Tanzania-Indonesia Business Meeting pada 12 Desember 2023. Dalam kesempatan ini, Tanzania Investment mempromosikan peluang kerja sama dan investasi yang terbuka, terutama di sektor kunci, termasuk agrikultur, industri perikanan atau kelautan, industri mesin dan kayu, serta pariwisata.



Duta Besar Tanzania dalam sambutannya menekankan aspek konektivitas Tanzania dan Indonesia yang diantaranya dapat dilakukan dengan mendorong terbukanya direct flight antar kedua negara.

Angola: Mendalami Peluang Kerja Sama Perdagangan

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Angola terus menunjukkan rekam jejak yang baik. Mengacu pada data dari CIA World Factbook 2023, nilai impor dari Indonesia ke Angola pada Januari hingga Juli 2023 telah mencapai USD 87.9 juta.

(lanjutan di halaman 19)



Dalam rangka memperkuat hubungan perdagangan ini, Kadin Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan Duta Besar Angola pada 20 Desember 2023. Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional, Bernardino Vega, memimpin langsung pertemuan ini yang membawa agenda peluang kerja sama perdagangan, terutama dalam sektor agrikultur, minyak kelapa sawit, litium, uranium, merkuri, alumunium, emas, berlian, dan perikanan.

UAE: Jelang Roadshow Dubai Chamber 2024

Indonesia memandang peran penting Uni Emirat Arab (UEA), khususnya Dubai sebagai salah satu hub perdagangan dunia. Nilai total perdagangan Indonesia dan UEA pada semester I 2023 tercatat mencapai USD 2,21 miliar.



Produk-produk Indonesia yang diekspor ke UEA antara lain mesin, kendaraan bermotor, peralatan listrik, suku cadang pesawat, produk dari kayu, batu berharga, makanan jadi, produk sayuran dan hewan, dan lain-lain. Sementara impor Indonesia dari UEA terdiri dari mesin, minyak bumi (crude oil), pelumas, alumunium, bahan kimia, biji plastik.

Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan momentum perdagangan antar kedua negara, maka pada 12 Desember 2023, Kadin Indonesia menerima Dubai Chamber di Indonesia. Selain berdiskusi tentang isu terkini, topik diskusi dalam pertemuan tersebut adalah mengenai persiapan Roadshow Dubai Chamber yang akan diselenggarakan pada 6-10 Mei 2024 di Indonesia. Sebanyak 15-20 perwakilan perusahaan UAE direncanakan akan mengikuti *roadshow* ini.



KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Joint Statement Kadin Indonesia, Dukung Platform AZEC Menuju Emisi Nol Bersih Asia



Kemitraan ASEAN-Jepang telah berlangsung selama 50 tahun dan telah meraih banyak capaian dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, mendekatkan masyarakat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dilansir dari laman resmi ASEAN, Jepang dan ASEAN merupakan mitra dagang yang penting bagi satu sama lain. Pada tahun 2022, total nilai perdagangan ASEAN-Jepang mencapai USD 268 miliar. Jepang juga merupakan investor asing terbesar kedua di ASEAN pada tahun 2022 dengan investasi sebesar USD 26,7 miliar.

Pada KTT Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang, Kadin Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional sekaligus Alternate Chair ASEAN-BAC, Bernardino Vega, bersama dengan Presiden RI, Joko Widodo, menandatangani *joint statement* dengan Keidanren dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia pada 19 Desember 2023.



Joint statement fokus pada penguatan kerja sama di sektor perekonomian dan keberlanjutan antara ASEAN dan Jepang, salah satunya melalui pembentukan Asia Zero Emission Community (AZEC). Dalam gelaran KTT ini, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional sekaligus Alternate Chair ASEAN-BAC, Bernardino Vega bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital, Pandu Sjahrir, menjadi narasumber pada diskusi panel dengan tema "Energy Transition in Asia through the Asia Zero Emission Community (AZEC)". Pada diskusi panel tersebut, kedua narasumber menyampaikan pandangan dan posisi Kadin Indonesia terhadap pertumbuhan transisi energi di Asia untuk mencapai emisi nol bersih.

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Kadin Indonesia Terus Dukung Digitalisasi UMKM melalui Kerja Sama Strategis



Berdasarkan data dari Kemenko Bidang Perekonomian RI, hingga Agustus 2023, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen, atau senilai dengan Rp9.580 triliun. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM menjadi penting guna mendorong efisiensi dan produktivitas hingga meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing di tengah pasar.

WIKI WIRAUSAHA

Sebagai induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia secara konsisten mendukung digitalisasi UMKM. Salah satu bentuk dukungannya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kadin dengan PT Eka Nusantara Gemilang pada 22 Desember 2023.

Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato, bersama CEO PT Eka Nusantara Gemilang, Yap Kok Leong, menandatangani langsung MoU ini. Adapun fokus MoU adalah pada inisiasi program e-UMKM Naik Kelas jadi Bintang Digital. MoU ini juga menjadi landasan program kolaborasi bagi pelatihan UMKM di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas digital sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Indonesia Business Forum (IBF) tvOne

**Indonesia Business Forum (IBF):
Pre-Event Dialog Capres Bersama Kadin 2024****Kadin Indonesia Tetap Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024**

Kadin Indonesia secara konsisten menegaskan sikap politik netral dan mendorong terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan damai. Hal ini kembali digaungkan oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, yang menjadi perwakilan Kadin Indonesia dalam Indonesia Business Forum (IBF) yang bertema “Visi Ekonomi Capres dan Cawapres, Realistis atau Sekedar Janji Manis?” pada 13 Desember 2023.



Selain memberikan pandangan dunia usaha terhadap visi capres dan cawapres dalam sektor ekonomi, IBF juga memberikan momentum untuk menekankan peranan Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Secara khusus, diskusi ini turut membahas arah pembangunan dunia usaha sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

(lanjutan di halaman 23)

Kadin Indonesia Tekankan Pentingnya Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Pilar pertama dari Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan resiliensi kesehatan. Industri kesehatan merupakan salah satu industri strategis yang daya saingnya dan perkembangannya perlu diprioritaskan.



Dalam IBF tanggal 20 Desember 2023, Ketua Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kadin Indonesia, Handojo S Muljadi dan Wakil Ketua Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kadin Indonesia, Randy Teguh, menjadi narasumber untuk topik 'Ketahanan Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045'.

Tayangan lengkap forum tersebut dapat diakses di YouTube tvOneNews dengan kata kunci 'Visi Ketahanan Kesehatan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 Capres-Cawapres | IBF tvOne'.

Pentingnya Aspek Kesejahteraan Guna Mencapai Visi Indonesia Emas 2045



Wakil Ketua Umum Bidang Investasi, Tony Wenas, menjadi narasumber dalam rangkaian forum IBF yang diselenggarakan pada 27 Desember 2023. Dalam paparannya, Tony menekankan pentingnya aspek kesejahteraan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan teknologi 4.0 di sektor manufaktur, pengembangan inklusi keuangan, peningkatan UMKM berdaya saing global, dan pemberdayaan pariwisata sebagai langkah kunci untuk mendorong kesejahteraan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Melalui keterlibatannya dalam dialog ekonomi jelang dialog capres ini, Kadin Indonesia berharap seluruh pengusaha nasional dapat terpapar oleh gagasan dan perkembangan ekonomi di tanah air guna mendukung kemajuan ekonomi nasional dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Tayangan lengkap forum tersebut dapat diakses di YouTube tvOneNews dengan kata kunci 'Janji Kesejahteraan Ekonomi, Mungkinkah Terwujud? | IBF tvOne'



SPECIAL SECTION: RAPIMNAS KADIN 2023

Persiapan Menjelang Rapimnas Kadin 2023

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) merupakan agenda tahunan tingkat nasional Kadin yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Kadin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, anggota luar biasa (ALB), hingga kementerian atau lembaga.

Agenda ini merupakan wadah yang menyatukan seluruh kepengurusan Kadin Indonesia. Gelaran ini juga dirancang untuk memberikan ruang diskusi dan kolaborasi bagi terbentuknya sinergi yang kokoh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan pelaksanaan Rapimnas Kadin 2023 berjalan dengan baik, pengurus Kadin Indonesia bersama panitia penyelenggara melaksanakan rangkaian rapat persiapan menjelang perhelatan tahunan ini.

Rapat Steering Committee dan Organizing Committee



Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Kadin 2023 Shinta W. Kamdani, Ketua Panitia Steering Committee (SC) Eka Sastra, dan Ketua Organizing Committee (OC) Sanny Iskandar, memimpin rapat pleno persiapan penyelenggaraan pelaksanaan Rapimnas 2023 pada 4 Desember 2023. Rapat ini bertujuan untuk menghimpun masukan untuk penyelenggaraan Rapimnas 2023 sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik.

Bersama seluruh komponen panitia pelaksana, rapat pleno yang dilaksanakan secara *hybrid* ini fokus membahas evaluasi kesiapan penyelenggaraan acara Rapimnas Kadin 2023 yang mencakup agenda kegiatan, materi acara, dan upaya menghimpun peserta. Pertemuan ini menjadi penting mengingat hasil Rapimnas akan menjadi landasan bagi program-program yang akan diimplementasikan oleh Kadin seluruh Indonesia dalam satu tahun mendatang.

(lanjutan di halaman 25)



Rapat Pengurus Lengkap 2023

Masih dalam rangkaian persiapan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2023, perwakilan pengurus menyelenggarakan Rapat Pengurus Lengkap pada 5 Desember 2023.



Rapat dihadiri oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, perwakilan anggota Dewan Usaha, perwakilan anggota Dewan penasehat, dan Wakil Ketua Umum serta Kepala Badan Kadin

Dalam pertemuan ini dibahas pokok-pokok laporan Dewan dan isu strategis untuk Rapimnas Kadin 2023 Indonesia.

Rapat Pengurus Harian (RPH) dan Rapat Pengurus Lengkap (RPL), Rumuskan Program Strategis 2024

Guna melakukan evaluasi kinerja program-program yang telah berjalan selama 2023 sekaligus mempersiapkan Rapimnas Kadin 2023, Kadin Indonesia mengadakan Rapat Pengurus Harian (RPH) pada 4 Desember 2023.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi ini juga mendiskusikan program-program strategis di tahun 2024 mendatang. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama di antara jajaran pengurus Kadin Indonesia serta mendorong ide-ide dan inovasi baru untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku usaha Indonesia untuk tercapainya visi Indonesia Emas 2045.





SPECIAL SECTION: RAPIMNAS KADIN 2023

Gelar Rapimnas, Kadin Indonesia Fokus Pada Pemilu Damai dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Pada 7 Desember 2023, Kadin Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2023 untuk merumuskan program kerja dan advokasi kebijakan tahunan organisasi untuk mendorong perekonomian nasional sekaligus aktif mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah. Pada Rapimnas Kadin tahun 2023 ini, Kadin Indonesia mengusung tema “Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang difokuskan pada penguatan perekonomian Indonesia dalam memasuki tahun pesta demokrasi dan menuju Indonesia Emas 2045.

Sesuai hasil Rapimnas, Kadin Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024, dengan fokus pada empat pilar utama organisasi demi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Keempat pilar tersebut meliputi pilar kesehatan, pilar pembangunan ekonomi nasional dan daerah, pilar kewirausahaan dan kompetensi, serta pilar penguatan organisasi dan tata regulasi.

Dalam Rapimnas 2023 juga disampaikan mengenai kinerja Kadin Indonesia yang tetap solid sepanjang tahun 2023. Dari total 191 program kerja yang dijalankan, Kadin Indonesia telah berhasil menjalankan 163 program kerja atau 91% total program kerja tahun 2023. Kadin Indonesia telah berhasil menjalankan inisiatif seperti gerakan Wiki Wirausaha, Kadin Impact Award, dan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), melibatkan program digitalisasi, pemberdayaan wanita, ekonomi berkelanjutan, dan sinergi ekonomi nasional dan daerah.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan bahwa tahun 2023 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian Indonesia, namun perekonomian Indonesia tetap tumbuh di atas 5 persen. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi semua pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga dunia usaha. Tahun mendatang, Kadin Indonesia meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik dengan peran aktif Kadin yang mendorong perekonomian nasional.

(lanjutan di halaman 27)

"Pada tahun 2024 mendatang, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Untuk mendukung target tersebut, Kadin Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah akan terus fokus melaksanakan program and inisiatif prioritas yang sudah berlangsung sepanjang tahun 2023 dan akan diteruskan pada tahun 2024," kata Yukki.



Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik dengan hasil Pemilu yang memengaruhi para pelaku usaha dalam menggenjot ekspansi bisnis dan investasi di Indonesia. Menurutnya, dalam jangka pendek, Pemilu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi seiring kecenderungan meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Dalam jangka panjang, dunia usaha mencermati dan berharap stabilitas politik untuk terlaksananya Pemilu yang damai. Kadin berkomitmen terhadap netralitas dalam Pemilu. Sebagai induk utama organisasi pengusaha di Indonesia, Kadin fokus dalam pertumbuhan ekonomi dan memastikan kondisi perekonomian yang stabil," tegas Shinta.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, mengungkapkan bahwa penguatan organisasi dan regulasi internal menjadi prioritas pengurus selama tahun 2023. Setelah sebelumnya di tahun 2022 Kadin Indonesia menyelesaikan penyempurnaan AD/ART dan melanjutkan yang kemudian disahkan menjadi Keppres No. 18/2023. Kadin Indonesia terus melakukan penyempurnaan peraturan organisasi (PO) yang berjumlah 23 peraturan serta mencabut dan tidak melakukan penyempurnaan terhadap 3 peraturan. Selain itu, tercatat sekitar 70% sinergi inisiatif antara para pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Daerah terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

(lanjutan di halaman 28)

"Sinergi inisiatif dan program kerja anggota Kadin Indonesia dan Kadin Daerah sangat penting untuk memperkuat peranan organisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Dewan Penasehat Kadin Indonesia juga telah mendukung Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, untuk melakukan tugas harian sebagai Plh Ketua Umum memastikan peran strategis Kadin Indonesia dalam pembangunan ekonomi," ujar Eka.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menekankan kesiapan seluruh pengurus Kadin untuk melaksanakan mandat Rapimnas 2023. Yukki menguraikan bahwa Kadin akan melanjutkan pengembangan program inovatif yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan program kerja yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan, kami yakin dapat mendekatkan Indonesia pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045," tutup Yukki.

Dalam kesempatan tersebut, Yukki mengapresiasi para pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Rapimnas 2023 ini, di antaranya Freeport Indonesia, BCA, Adaro, Sinarmas, Royal Golden Eagle, Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), Kapal Api, Unilever, Mayora, Agro Manunggal, Indofood, Vale, dan Tiktok.

Sebagai informasi, setiap tahun Dewan Pengurus Kadin Indonesia diamanahkan untuk menyelenggarakan Rapimnas sesuai Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Rapimnas ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran strategis dunia usaha dan industri yang dapat disinergikan dengan program-program pemerintah, sehingga tercipta kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang mendorong dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, yang secara khusus menjadi pijakan mencapai visi Indonesia Emas 2045.





SPECIAL SECTION: RAPIMNAS KADIN 2023

Penguatan Advokasi melalui Forum Anggota Luar Biasa (ALB)



Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia merupakan keanggotaan yang terdiri dari organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan. Sebagai bagian dari rangkaian Rapimnas Kadin 2023, Kadin Indonesia mengadakan Forum Anggota Luar Biasa (ALB) pada 6 Desember 2023 yang dihadiri oleh 88 peserta dari ALB. Forum ini dirancang sebagai wadah para pelaku usaha asosiasi yang merupakan ALB Kadin Indonesia memberikan masukan dan saran.



Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, dan Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia, Wisnu W. Pettalolo, memimpin berjalannya forum ini. Pada kesempatan ini, ALB Kadin Indonesia secara aktif memberikan saran dan masukan mengenai kebijakan pemerintah, program dan inisiatif Kadin Indonesia, maupun isu-isu penting lainnya yang berkaitan dengan dunia usaha dan industri Indonesia. Forum ALB menghasilkan rencana pelaksanaan sinergi asosiasi yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang dengan melibatkan 208 asosiasi se-Indonesia.

SPECIAL SECTION: RAPIMNAS KADIN 2023

Forum Direktur Eksekutif Kadin: Dorong Kemajuan Organisasi dan Kontribusi Pembangunan di Daerah

Sebagai bagian dari kegiatan Pra-Rapimnas Kadin 2023, Kadin Indonesia mengadakan Forum Direktur Eksekutif (DE) yang mempertemukan Direktur Eksekutif Sekretariat Kadin di seluruh Indonesia. Forum yang diadakan sesuai arahan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, dihadiri oleh DE dari 24 provinsi.

Pertemuan yang berlangsung pada 6 Desember 2023 ini membahas beberapa agenda khusus, yang fokus pada upaya meningkatkan layanan Sekretariat Kadin di seluruh Indonesia, membahas isu-isu seperti strategi organisasi, pengelolaan anggaran, dan optimalisasi sumber daya organisasi untuk memastikan operasional sehari-hari Kadin berjalan dengan baik.





Kadin Indonesia Kembali Tegaskan Sikap Netral dalam Pemilu 2024, Fokus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kadin Indonesia kembali menegaskan sikap politik netral dan mendorong terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan damai. Penegasan sikap tersebut disampaikan secara terbuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2023, di tengah dinamika politik yang melibatkan pengurus Kadin dalam tim pemenangan masing-masing salah satu pasangan capres 2024.

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi dunia usaha sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi, Kadin memastikan sikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024 tanpa memihak salah satu pasangan capres.



“Merujuk pada ketentuan dalam pasal 1 UU Kadin No.1/1987, Kadin Indonesia adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Kadin Indonesia tidak pernah mengeluarkan anjuran, ajakan ataupun rekomendasi kepada anggota atau siapa pun untuk memenangkan pasangan tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024. Terkait dengan preferensi politik, Kadin Indonesia menyerahkan kebebasan kepada anggota sebagai pilihan masing-masing individu bukan mengatasmakan Kadin,” ujar Yukki.

Yukki menambahkan, Kadin Indonesia juga berharap dan mendukung pelaksanaan pemilu yang sesuai peraturan, jujur, adil dan damai sehingga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bisa terjaga.

“Pemilu merupakan pesta demokrasi sehingga harus dilaksanakan dengan suka cita, tanpa harus bertikai. Pada dasarnya, Pemilu merupakan ajang bersaing untuk bersanding dalam rangka membangun Indonesia menjadi lebih maju,” tutur Yukki.

(lanjutan di halaman 32)

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Eka Sastra, mengungkapkan Kadin merupakan organisasi dunia usaha yang berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam bidang perekonomian. Sementara dalam Anggaran Dasar Kadin juga dinyatakan bahwa Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah maupun organisasi politik.



“Dalam hubungan itu, seyogyanya pengurus Kadin tidak membawa nama Kadin dalam kegiatan politik praktis, meskipun masing-masing individu memiliki hak untuk menentukan pilihan warna dan jalur politik yang harus diambil. Tetapi, kegiatan politik praktis yang diikuti oleh para petinggi dari suatu jabatan organisasi pada gilirannya akan menimbulkan conflict of interest dan akan dapat menyeret nama organisasi yang bersangkutan, dan memungkinkan berimbas menyulitkan posisi organisasi ke depan,” kata Eka.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, juga mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik dengan kepastian politik akan hasil Pemilu memengaruhi para pelaku usaha dalam menggenjot ekspansi bisnis dan investasi di Indonesia. Menurutnya, dalam jangka pendek, Pemilu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi seiring kecenderungan meningkatnya konsumsi masyarakat.

“Dalam jangka panjang, dunia usaha mencermati dan berharap stabilitas politik untuk terlaksananya Pemilu yang damai. Kadin berkomitmen terhadap netralitas dalam Pemilu. Sebagai induk utama organisasi pengusaha di Indonesia, Kadin fokus dalam pertumbuhan ekonomi dan memastikan kondisi perekonomian yang stabil. Rapimnas Kadin 2023 merupakan wadah untuk merumuskan pemikiran strategis dunia usaha yang disinergikan dengan program dan regulasi pemerintah sehingga mendorong penguatan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Shinta.





Malam Penghargaan Kadin Impact Award

Kadin Impact Award merupakan salah satu inisiatif prioritas Kadin Indonesia untuk memberikan apresiasi terhadap kontribusi Kadin Daerah dalam memperkuat perekonomian nasional. Melalui 20 program unggulan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, inisiatif ini menjadi bukti nyata kolaborasi inklusif multi-stakeholder antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra pemangku kepentingan relevan lainnya.

Sepanjang tahun 2023, tim Penilai Kadin Impact Award telah menyelesaikan kunjungan ke 15 titik penilaian.



KADIN PROVINSI JAWA TIMUR

Kadin Institute

Program Vokasi Kadin Jawa Timur berorientasi menyiapkan tenaga kerja siap pakai



KADIN KOTA BANDUNG

Catering Academy

Catering Academy merupakan bekal bagi pelaku usaha catering di Kota Bandung



KADIN KOTA SURAKARTA

SGS Go

Program SGS Go dari Kadin Kota Surakarta berhasil meningkatkan perekonomian Kota Surakarta



KADIN KABUPATEN WONOSOBO

Markaz UMKM

Aplikasi Markaz UMKM, sebuah langkah ciptakan lingkungan bisnis yang suportif

(lanjutan di halaman 34)



KADIN PROVINSI JAWA BARAT

Cakra Desa

Kadin Provinsi Jawa Barat berhasil mendorong pemanfaatan lahan tidur melalui program Cakra Desa



KADIN PROVINSI ACEH

Konsorsium Bawang Merah

Konsorsium Bawang Merah berhasil menjadikan bawang merah sebagai stabilisator harga bawang merah di Aceh



KADIN PROVINSI BALI

Pertanian Pola Organik

Kadin Provinsi Bali dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan sektor pertanian di Indonesia melalui pelestarian sistem Subak Bali yang menerapkan warisan budaya UNESCO



KADIN KABUPATEN DONGGALA

Sulteng Corn Collaboration 4.0

Program Sulteng Corn Collaboration 4.0 meningkatkan kapasitas petani jagung dan pertumbuhan sektor perkebunan jagung di Kabupaten Donggala



KADIN KOTA BALIKPAPAN

Bidfish.id

Bidfish.id mengubah cara nelayan menjual ikan dengan lelang online dan mendorong pertumbuhan ekonomi biru Kalimantan Timur melalui digitalisasi



KADIN KABUPATEN BENGKALIS

Soodu.id

Aplikasi Soodu.id mendorong UMKM lokal memasuki pasar digital, menciptakan inovasi, serta meningkatkan performa bisnis secara signifikan untuk pelaku UMKM di Bengkalis



KADIN KABUPATEN MUARA ENIM
Desaku Muara Enim

Kadin Kabupaten Muara Enim membangkitkan UMKM yang tersebar di 246 desa dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal melalui Program Desaku



KADIN KOTA KEDIRI
Rumah Kurasi

Rumah Kurasi memperkuat ekonomi Kota Kediri dengan pemberdayaan UMKM melalui mentoring, sertifikasi, dan ekspansi pasar



KADIN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

**Green Energy
Co-Firing
Wood Chips**

Merupakan program substitusi batu bara yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan memperhatikan lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur



KADIN KABUPATEN
MANGGARAI

**Kadin Pertanian
Hub**

Program 'Kadin Pertanian Hub' di Manggarai Barat mengintegrasikan pertanian lokal dengan pariwisata unggulan seperti Labuan Bajo



KADIN PROVINSI
BENGKULU

**Sirup
Kalamansi**

Program Sirup Kalamansi menggerakkan pertumbuhan petani perempuan, mengintegrasikan mereka dalam kemajuan perekonomian Provinsi Bengkulu



Ketahui lebih lengkap mengenai
Kadin Impact Award 2023 dengan mengunduh
booklet berikut:

<http://tinyurl.com/BookletKIA>

Highlight Kegiatan Kadin Indonesia Sepanjang 2023

Januari



16-20 Jan | World Economic Forum



30 Jan | ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Chairperson Handover Ceremony

Februari



13 Feb | Launching Kadin Impact Award (KIA) 2023

Maret

19-21 Mar | Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktur Eksekutif Kadin Se-Indonesia

Juni

13 Jun | Sosialisasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Mei

7-10 Mei | Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)

April

30 Apr | Peluncuran Kadin for Naker

Juli

27 Jul | Forum Bisnis Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin dengan Menko Perekonomian

Agustus

3-5 Ags | Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF)

8-11 Ags | Business Matching WikiExport Jepang (WikiExport.JP) di Tokyo, Jepang

14-16 Ags | Forum Sinergi BUMN-Swasta



17 Ags | Upacara HUT ke-78 Republik Indonesia di IKN

September



1-6 Sep | Rangkaian Gelaran ASEAN BAC 2023



7-8 Sep | Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023



22 Sep | Penyerahan Peta Jalan Indonesia Emas 2045



24 Sep | HUT Kadin Indonesia ke-55

Desember



7 Des | Rapimnas Kadin 2023

13-16 Des | ASEAN-Japan Young Leaders summit 2023

13, 20, dan 27 Des | Indonesia Business Forum Seri Indonesia Emas 2045: Pre-Event Dialog Capres dengan Kadin

November

1-2 Nov | Indonesia International Waste Treatment Technology (IIWTT) Forum & Expo 2023



14-16 Nov | APEC CEO Summit 2023

30 Nov | Pembukaan COP 28

Penyelenggaraan **8 Rapimprov Kadin** selama Bulan November 2023

Oktober

18-22 Okt | Trade Expo Indonesia (TEI) 2023

26 Okt | Peresmian Gerakan BERS

30 Okt | Penyerahan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 kepada Ketua MPR RI



Silaturahmi Sekretariat Kadin Indonesia

Keluarga Besar Pengurus Harian & Sekretariat Kadin Indonesia bersilaturahmi dalam rangka menutup tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024 pada 22 Desember 2023 di Menara Kadin Indonesia

Exclusive Interview



Tony Wenas

WAKIL KETUA UMUM BIDANG INVESTASI KADIN INDONESIA
DAN PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA

Dalam rangka menutup tahun 2023 dan menyongsong tahun 2024, Kadin Indonesia berkesempatan mewawancarai WKU Bidang Investasi Kadin Indonesia sekaligus Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas terkait PT Freeport Indonesia dan hilirisasi industri.

Apa saja fokus prioritas yang menjadi perhatian dari PT Freeport Indonesia saat ini?

PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini tengah berfokus pada penyelesaian pembangunan smelter kedua yang berlokasi di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur. Pada awal 2024, PTFI juga akan melakukan pre-commissioning dan commissioning untuk memastikan seluruh peralatan dan fasilitas berfungsi dengan baik.

Smelter PTFI nantinya akan mulai beroperasi pada akhir Mei 2024 dan secara bertahap akan meningkatkan produksi penuh hingga Desember 2024. Hingga November 2023, PTFI telah menanamkan investasi hingga USD 2,94 miliar atau setara 43 triliun rupiah dari total anggaran USD 3 miliar atau setara 45 triliun rupiah. Dengan fokus ini, PTFI berharap relaksasi ekspor konsentrat tembaga dapat terus diberikan sampai smelter tersebut beroperasi penuh. Smelter ini nantinya mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

Dalam konteks hilirisasi industri, bagaimana PT Freeport Indonesia melihat signifikansi hilirisasi ini dan mengapa hilirisasi memiliki peran krusial dalam memperkuat ekonomi Indonesia?

Setiap mineral memiliki nilai tambah yang berbeda satu sama lain. PTFI melihat secara keseluruhan hilirisasi harus dilakukan agar industrialisasi berjalan di dalam negeri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter hasil tambang, termasuk smelter PTFI, bisa menjadi pijakan Indonesia menuju negara maju, dari yang bertumpu pada konsumsi ke depan akan bertumpu pada produksi. Mengingat saat ini dunia usaha sedang menuju renewable energy, sekitar 65%—70% tembaga di dunia digunakan untuk menghantar listrik karena tembaga adalah logam terbaik untuk menghantar listrik. Tembaga sangat diperlukan untuk mendukung energi terbarukan (renewable energy) dan elektrifikasi.

(lanjutan di halaman 39)

Secara teknis, mobil elektrik memerlukan tembaga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan mobil konvensional. Satu unit electric vehicle charger memerlukan sekitar 8 kg tembaga (untuk 200kW). Selain itu, diperlukan sekitar 5,5 ton tembaga per MW dalam sistem PLTS (solar technology), antara lain untuk heat exchangers (penukar panas) dan kawat/kabel dan sekitar 1,5 ton tembaga per 1 MW dalam sistem PLTB (wind farms), antara lain untuk kawat/kabel dan komponen turbin. Namun, beberapa analis memperkirakan terjadi kenaikan permintaan tembaga yang tidak sejalan dengan pembukaan tambang tembaga baru yang signifikan untuk memenuhi suplai di seluruh dunia.

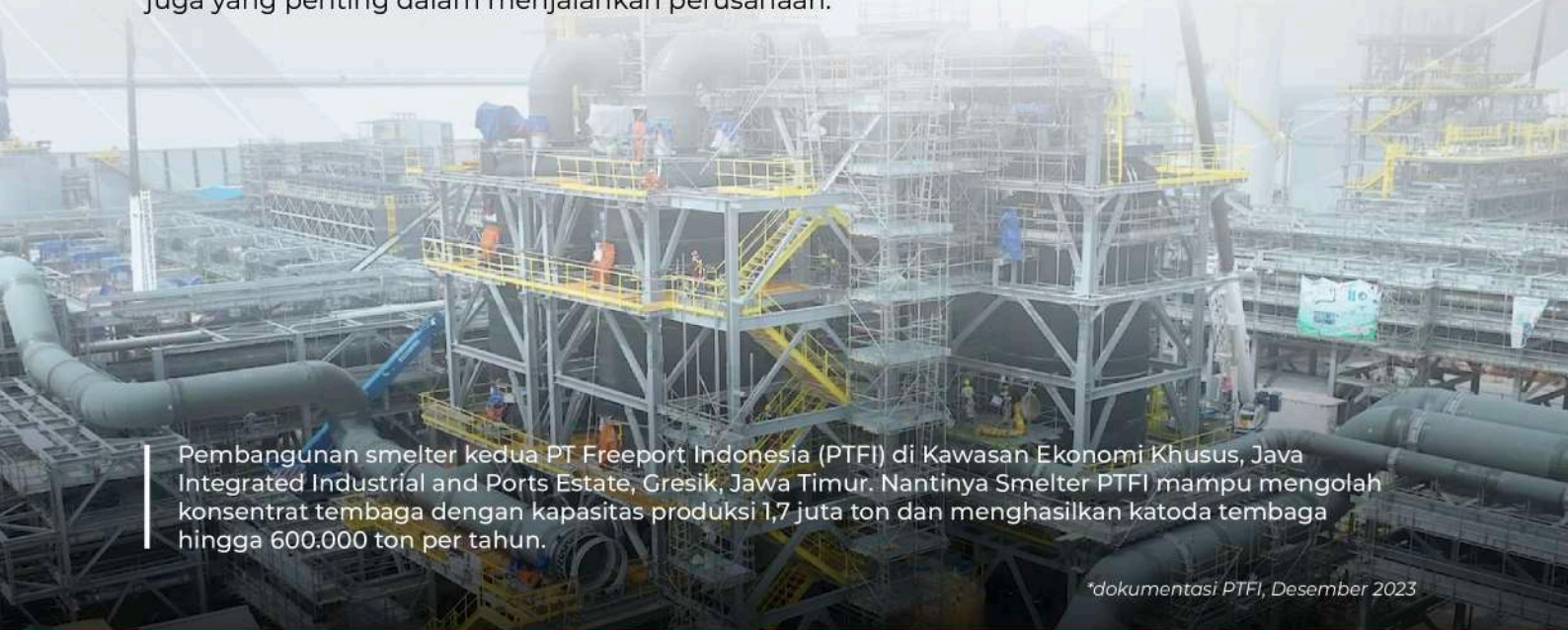
Apa saja rencana jangka panjang yang telah dipersiapkan oleh PT Freeport Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan?

PTFI ke depannya akan terus menambang dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Prinsip Safe & Sustainable Production atau Produksi yang Aman dan Berkelanjutan merupakan prinsip yang dianut oleh PTFI. Meskipun sumber daya alam (SDA) yang kami olah tergolong tidak terbarukan namun, seluruh kegiatan operasional kami laksanakan dengan mengikuti prinsip keberlanjutan. Selain itu, PTFI juga memiliki investment plan hingga 2041 untuk memaksimalkan kebermanfaatan kepada negara, masyarakat dan shareholders.

Menurut pandangan Pak Tony, apa saja kriteria yang perlu dimiliki untuk menjadi pemimpin yang baik?

Terdapat empat hal pokok yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan untuk menanamkan nilai kejujuran atas diri sendiri serta terhadap orang lain, konsisten dengan kedisiplinan, fokus serta tulus dalam menjalani setiap pekerjaan. Dalam pengalaman bersama PTFI, saat ini diterapkan nilai-nilai perusahaan yaitu Safety, Integrity, Commitment, Respect, and Excellence, yang disingkat menjadi SINCERE kepada seluruh karyawan.

Memimpin perusahaan diibaratkan seperti memimpin sebuah band atau orkestra. Pemimpin tidak harus expert memainkan semua alat, tapi pemimpin bisa tahu kapan pemain gitar harus dominan, kapan keyboardist harus melakukan improvisasi sehingga tercipta harmonisasi. Itu juga yang penting dalam menjalankan perusahaan.



Pembangunan smelter kedua PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus, Jawa Integrated Industrial and Ports Estate, Gresik, Jawa Timur. Nantinya Smelter PTFI mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

Opini Pengurus **Kadin Indonesia**

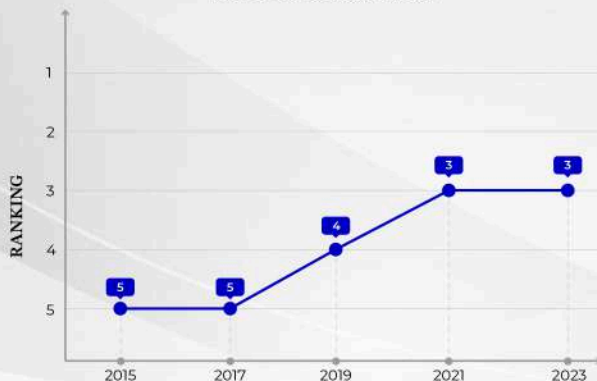


Irawadi D. Hanafi

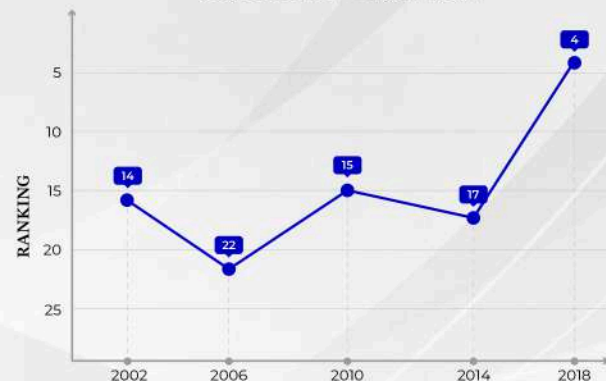
WAKIL KETUA UMUM BIDANG INDUSTRI
OLAHRAGA KADIN INDONESIA

Prestasi olahraga Indonesia umumnya dinilai berdasarkan keberhasilan dalam kejuaraan multi-event, seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Pada tahun 2023, hanya terdapat dua gelaran, yaitu SEA Games di Kamboja, dimana Indonesia menduduki peringkat ke-3 di bawah Vietnam dan Thailand, dan ASIAN Games di Tiongkok, dimana Indonesia berada pada peringkat ke-13. Pada kejuaraan multi-event olimpiade, Indonesia belum menunjukkan performa maksimalnya. Beberapa contoh berikut, misalnya pada cabang olahraga Balap Sepeda, Indonesia baru dua kali lolos seleksi untuk berlaga di olimpiade pada tahun 2016 (ranking 28/32) dan tahun 2020 (ranking 9/9). Pada cabang olahraga Renang, Indonesia berlaga pada olimpiade pada tahun 2020, membawa 3 atlet dan 2016 dengan membawa 2 atlet dimana salah satunya lolos melalui wildcard. Pada cabang olahraga ini, Indonesia belum mendapatkan medali, dimana Indonesia mencetak ranking dengan rata-rata ranking 3 terbawah. Sementara itu, pada cabang olahraga Senam, Indonesia lolos untuk pertama kalinya melalui Kualifikasi World Artistic Gymnastics Championships 2023 di Antwerp, Belgia.

SEA Games



ASIAN Games



Saat ini, tim Indonesia sedang menjalani tahap kualifikasi di Olimpiade 2024 di Paris. Hanya beberapa cabang olahraga yang berhasil lolos sampai saat ini (per Desember 2023), seperti panahan yang menjadi cabang pertama dan disusul dengan panjat tebing. Sementara itu, cabang olahraga lain, seperti angkat besi, bulu tangkis, dan beberapa lainnya, masih menanti hasil menunggu hasil kualifikasi.

(lanjutan di halaman 41)

Melihat posisi Indonesia yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa sektor olahraga di negara ini mengalami stagnasi. Prestasi olahraga bukan hanya hasil dari perencanaan semata, namun juga memerlukan investasi yang signifikan. Bagaimana mungkin Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain, seperti Vietnam, Thailand, dan negara Asia lainnya, bila anggaran olahraga yang disediakan oleh APBN masih sangat kecil, atau hanya sekitar 0,01 persen dari total anggaran. Di tahun 2024 sendiri, Pagu Definitif Kemenpora Tahun Anggaran 2024 (Rp 2,02 triliun) mengalami penurunan sekitar 20 persen (sekitar Rp 507 miliar) jika dibandingkan dengan Pagu Definitif Kemenpora tahun 2023 (Rp 2,53 triliun).

Menjelang pesta demokrasi, terutama pemilihan Presiden pada Februari 2024 mendatang, debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) sudah memasuki tahap ketiga dengan mengusung tema “ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN”. Ironisnya, tema debat yang begitu padat dan menyeluruh tersebut tidak mencakup kondisi sektor olahraga di tanah air, meskipun olahraga telah menjadi identitas utama bangsa Indonesia di tingkat internasional.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mencatat bahwa Indonesia telah memulai masa kejayaan dalam prestasi olahraga di tingkat dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an. Prestasi ini dimulai dengan perolehan medali emas pertama bagi Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis pada Olimpiade 1988 di Seoul, Korea Selatan, disusul dengan sumbangan dua medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis pada Olimpiade Barcelona 1992 di Spanyol.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi landasan bagi pengembangan sektor olahraga di Indonesia. Terdapat 14 cabang olahraga yang menjadi prioritas di dalamnya berdasarkan prestasi dan peluang medali yang bisa diperoleh. Ke-14 cabang olahraga tersebut mencakup bulutangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, renang, atletik, senam artistik, pencak silat, dan dayung.

Selain berfokus pada sektor olahraga, Indonesia juga perlu untuk melakukan pengembangan dalam sektor industri olahraga. Saat ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tengah berfokus pada prestasi olahraga Indonesia dan berupaya meningkatkan industri olahraga di Indonesia. Langkah-langkah pentingnya termasuk mengidentifikasi dan membina pusat industri olahraga yang sudah ada, serta membangun pusat peralatan olahraga agar mudah diakses masyarakat. Dengan mewujudkan industrialisasi olahraga, diharapkan fasilitas dan event olahraga meningkat, mendukung peningkatan atlet, serta melibatkan investor olahraga. Beberapa peran penting industri olahraga adalah memberdayakan ekonomi rakyat dan mengurangi kemiskinan. Kesuksesan sektor industri olahraga juga berdampak luas pada kesejahteraan sosial.

Meskipun pemerintah sudah berupaya mendukung perkembangan industri olahraga, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya dukungan regulasi, dan kekurangan tenaga kerja berkualitas di sektor tersebut. Pemerintah dan swasta diharapkan dapat merumuskan berbagai kebijakan dan strategi, termasuk pembinaan industri olahraga, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri, dan pembangunan sentra usaha mikro. Untuk itu, pada saat ini Kadin Indonesia bersama dengan pelaku usaha industri olahraga sedang membentuk sebuah asosiasi yang dapat memajukan sektor industri olahraga di Indonesia (Peralatan dan jasa olahraga).

(lanjutan di halaman 42)

Sektor olahraga terus menjadi perhatian para pemimpin Indonesia. Mengutip Bung Karno, “Membangun Olahraga adalah Membangun Bangsa”, dan Soeharto juga mengumandangkan “Mengolahragakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga”. Selain itu, di era presiden Joko Widodo, terdapat Peta Jalan Olahraga Indonesia Emas 2045 dimana Indonesia memiliki target untuk berada di posisi lima besar di dunia.

Penting untuk diingat bahwa di tingkat internasional, hanya terdapat dua momen dimana lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan, yaitu ketika presiden Republik Indonesia berkunjung ke luar negeri dan ketika atlet Indonesia menerima kalung medali emas.

Sayangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mungkin tidak memahami peran penting dunia olahraga dalam pembangunan bangsa ini, padahal saat tim nasional kita berlaga, seperti sepakbola, bulutangkis, dan cabang olahraga lainnya, seluruh elemen bangsa bersatu. Tidak ada Partai A atau Partai B, tidak ada relawan pihak A atau pihak B. Semua bersorak untuk Indonesia.

Kita berharap bahwa siapapun pemimpin kita ke depan, kiranya dunia olahraga akan mendapatkan perhatian yang layak dan sepadan.



Untuk mengunduh buku Peta Jalan
Desain Besar Olahraga Nasional dapat melalui
tautan berikut:

<http://tinyurl.com/PetaJalanOlahraga>

Bagi Bapak/Ibu Pengurus Kadin Indonesia yang ingin memberikan opini, saran, atau menyumbangkan pemikiran di dalam Kadin News, silakan untuk mengirimkan ke email Humas Sekretariat Kadin Indonesia di **humas@kadin.id atau melalui masing-masing PMO.*

MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Dukungan dalam
Penerapan **Net Zero**



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Dukungan terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Potongan Harga Menarik
dari Mitra-Mitra Kadin



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial

CARA PENDAFTARAN

Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjungi **anggota.kadin.id**

1



Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan

2



Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**

3



Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**

4



Masuk dengan akun yang didaftarkan

5



Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan:

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab

6



Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran

7



Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice

8



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**

9



Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjungi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

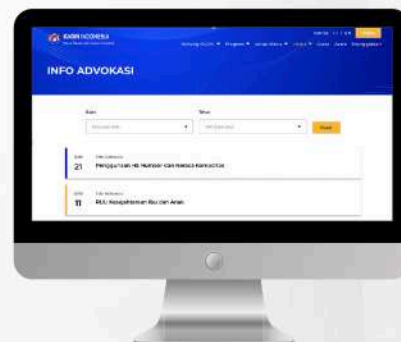
Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

KABAR TERKINI

Outlook Peraturan Tahun 2024: Harapan untuk Perbaikan dan Pengembangan yang Lebih Baik

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Pendahuluan

Sebagaimana dibahas dalam Indonesian Law Digest (ILD) edisi akhir tahun, yang berjudul “Kaleidoskop Peraturan Tahun 2023: Jumlah dan Highlight Peraturan,” tahun 2023 terbukti menjadi salah satu tahun penting dalam hal kerangka hukum baru, seperti yang dapat dilihat melalui penerbitan sejumlah besar instrumen hukum. Banyak Peraturan yang diterbitkan selama tahun 2023 ditujukan untuk perbaikan dan peningkatan instrumen hukum yang ada, namun berbagai kerangka hukum lainnya bersifat lebih baru dan bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang lebih baik di berbagai sektor.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah menerbitkan 47 Rancangan Undang-Undang, yang telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2024 (“Prolegnas Prioritas 2024”). Dari 47 RUU tersebut, 10 merupakan tambahan baru, sedangkan 37 sisanya diambil dari Prolegnas Prioritas tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, berbagai Peraturan Pelaksana yang amat dinanti tengah ditunggu oleh masyarakat dan pelaku usaha di berbagai sektor. Untuk memberi gambaran informatif tentang tahun 2024 mendatang dan apa yang dapat diharapkan dari perspektif peraturan, ILD edisi ini berfokus pada sejumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan yang paling dinanti, kerangka yang kemungkinan akan diteliti dengan cermat oleh pengadilan Indonesia sepanjang tahun. Diskusi kami telah dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

- 1. Prolegnas Prioritas 2024: RUU yang Telah Lama Ditunggu dan Diminati**
 - A. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
 - B. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen
 - C. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
 - D. RUU tentang Hukum Acara Perdata
 - E. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
- 2. 2024: Peraturan Pelaksana yang Ditunggu**
 - A. Peraturan Pelaksana Berbagai UU yang Baru Diundangkan
 - B. Highlight Rancangan Peraturan

I. Prolegnas Prioritas 2024: RUU yang Telah Lama Ditunggu dan Diminati

DPR telah memasukkan total 47 RUU sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2024. Seperti yang dirangkum di bawah ini:

(lanjutan di halaman 47)



Daftar RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2024

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2023 tentang Penyiaran	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
RUU tentang Pertanahan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran
RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
RUU tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
RUU tentang Permuseuman	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
RUU tentang Pertekstilan	RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Perubahan Iklim	RUU tentang Komoditas Strategis
RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Mengingat bahwa pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi Indonesia tengah mengantisipasi potensi penerbitan peraturan utama yang akan berlaku di sektor masing-masing, kami telah menyusun peta sektoral yang membahas berbagai sektor yang berpotensi terkena dampak 47 RUU, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Sektor	Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas 2024
Energi	Satu RUU per sektor
Ketenagakerjaan	
Tanah dan Bangunan	
Transportasi dan Layanan Logistik	
Lingkungan Hidup	Dua RUU per sektor
Farmasi, Layanan Kesehatan, dan Standar Obat dan Makanan	
Profesional	
Teknologi, Media dan Telekomunikasi	
Manufaktur dan Industri	Tiga RUU per sektor
Sumber Daya Alam	
Lain-Lain	29 RUU

Selama bertahun-tahun, Hukumonline telah membuat banyak rangkuman dan analisis RUU penting, seperti yang ditampilkan dalam Prolegnas Prioritas, beberapa di antaranya juga telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2024. Pada bagian berikutnya, kami menawarkan highlight dari beberapa RUU yang saat ini menjadi sorotan publik dan yang juga telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2024.

A. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan sudah cukup lama ditampilkan dalam daftar Prolegnas Prioritas RUU. Selain itu, dalam ILD Outlook edisi tahun lalu, kami juga merangkum beberapa pembaruan yang telah diperkenalkan sehubungan dengan RUU penting ini.

(lanjutan di halaman 49)

Pada bulan November 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa sejumlah persoalan masih perlu diselesaikan melalui pembahasan RUU yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, setidaknya ada empat poin, seperti yang diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diharapkan dapat dimasukkan ke dalam RUU. Poin-poin tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini:^[1]

Nilai Ekonomi Karbon (Pasal 7B)		
Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	Mekanisme Perdagangan Karbon	Pendanaan Luar Negeri dan Kerja Sama Antarpemerintah Sehubungan dengan Proyek Konservasi Energi
Tingkat Komponen Dalam Negeri (Pasal 24 dan Pasal 39)		
(1) Upaya mengutamakan penggunaan produk dan potensi domestik melalui pertimbangan kemampuan produk dan potensi domestik; (2) Harga energi baru/energi terbarukan yang tetap kompetitif; (3) Pendanaan fleksibel.		
Rumusan Kerja Sama Jaringan (Pasal 29a dan Pasal 47a)		
Pemerintah bertujuan mengatur isi Rumusan Kerja Sama Jaringan dengan mengharuskan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen dalam kaitannya dengan tenaga listrik dan penyelenggaraan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang dihasilkan melalui bentuk energi baru dan terbarukan.		
Nilai Ekonomi Karbon (Pasal 7B)		
Peruntukan Dana Energi Baru dan Terbarukan	Badan Pengelola Dana Energi Baru dan Terbarukan	

Untuk mengantisipasi diundangkannya RUU ini, pelaku usaha yang bergerak di sektor energi harus mencermati ketentuan yang baru diperkenalkan ini. Selain itu, dapat dikatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam RUU juga akan mempengaruhi pelaku usaha yang bisnisnya berkaitan erat dengan perdagangan karbon, konservasi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RUU ini, lihat ILB No. 4403 dan ILD No. 682.

B. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada Juli 2023, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional ("BPKN") menyatakan optimisme bahwa RUU ini akan diundangkan dalam waktu dekat. Selama 22 tahun terakhir, BPKN secara kumulatif telah mengusulkan 263 rekomendasi yang harus dimasukkan ke dalam RUU, yang mencakup pemberian hak eksekutorial dan independensi bagi BPKN, serta aspek perlindungan konsumen lainnya yang berlaku di era digital melalui penegakan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.^[2]

(lanjutan di halaman 50)

[1] CNBC Indonesia, "RUU Energi Baru Lagi Disusun, Ini Usulan Terbaru Pemerintah" diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120131433-4-490381/ruu-energi-baru-lagi-disusun-ini-usulan-terbaru-pemerintah-pada-tanggal-29-desember-2023>. | [2] Antara, "Ketua BPKN Optimis RUU Perlindungan Konsumen Segera Disahkan" diakses melalui: <https://www.antaranews.com/berita/3644604/ketua-bpkn-optimis-ruu-perlindungan-konsumen-segera-disahkan-pada-tanggal-29-desember-2023>.

Dalam hal perkembangan terbaru RUU selama tahun 2023, setidaknya lima poin revisi telah diidentifikasi dan akan diperkenalkan dalam versi terbaru RUU, sebagai berikut:^[3]

Definisi Konsumen	Definisi Pelaku Usaha, yang telah dibagi menjadi dua jenis: pelaku usaha barang dan penyedia jasa
Penegasan Kewajiban Konsumen	Pembahasan pencantuman klausula baku
Tanggung jawab pelaku usaha, sehubungan bahwa semua pelaku usaha dapat dikenai sanksi tanpa harus terbukti bersalah dari pelanggaran apa pun.	

Setelah diundangkan, RUU ini akan berdampak pada berbagai sektor usaha, khususnya pelaku usaha yang bisnisnya berpusat pada konsumen. Selain itu, penting juga bagi konsumen untuk tetap mengetahui kewajibannya, sebagaimana diatur secara khusus dalam RUU.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RUU, lihat juga: "Poin Penting Perubahan dalam Revisi UU Perlindungan Konsumen".

C. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Anggota DPR Komisi VIII telah menyatakan bahwa RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa Peraturan saat ini tentang kesejahteraan ibu dan anak terlalu luas tersebar di sejumlah instrumen hukum yang berbeda. Dengan demikian, RUU akan menempatkan seperangkat peraturan terpadu dan komprehensif yang membahas keseluruhan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan keadaan yang pasti dialami ibu dan anak.^[4]

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR juga telah mengklarifikasi bahwa RUU ini akan mengatur berbagai hal yang semula dibahas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, RUU ini akan meningkatkan fokus pada memastikan kesejahteraan ibu hamil hingga ibu yang merawat anaknya sampai usia dua tahun.^[5]

Tabel di bawah ini membahas beberapa poin yang telah di-highlight dalam RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak:

Hak dan Kewajiban Ibu, Anak dan Anggota Keluarga
Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memastikan Kesejahteraan Ini
Cuti Melahirkan Wajib Berbayar

(lanjutan di halaman 51)

[3] Hukumonline, "5 Poin Penting dalam RUU Perlindungan Konsumen" diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-poin-penting-dalam-ruu-perlindungan-konsumen-lr64942d50c2d40/> pada tanggal 29 Desember 2023. | [4] Kompas, "RUU KIA Bakal Atur Penyelenggaraan Kesejahteraan serta Pendidikan ibu dan Anak Secara Komprehensif" diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/07/0955377/dpr-ruu-kia-bakal-atur-penyelenggaraan-kesejahteraan-serta-pendidikan-ibu-pada-tanggal-29-desember-2023>. [5] DPR, "Marwan Daspong Tegaskan RUU KIA Berbeda dengan UU tentang Anak" diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46748/t/Marwan+Daspong+Tegaskan+RUU+KIA+Berbeda+Dengan+UU+Tentang+Anak> pada tanggal 29 Desember 2023.

Meskipun telah dirumuskan secara khusus untuk melindungi kesejahteraan ibu dan anak, RUU tersebut pasti akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan, khususnya aspek yang terkait dengan pemberian cuti melahirkan wajib berbayar. Selain itu, perlu juga digarisbawahi bahwa mungkin ada potensi risiko diskriminasi yang dialami oleh pekerja perempuan di sektor ketenagakerjaan. Dalam hal ini, penting untuk memandang cuti melahirkan sebagai tanggung jawab bersama yang seharusnya tidak hanya ditanggung oleh perusahaan tetapi juga oleh negara dan masyarakat pada umumnya.^[6]

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RUU ini, lihat ILB No. 4405 dan ILD No. 775.

D. RUU tentang Hukum Acara Perdata

RUU ini sebelumnya sudah tercantum dalam daftar Prioritas Prolegnas pada tahun 2004.^[7] Namun, seiring berjalannya tahun, dihapus dari daftar Prolegnas hingga akhirnya dimasukkan kembali pada tahun 2019,^[8] yang akhirnya ada sampai sekarang.

Versi terbaru dari RUU ini, sebagaimana diakses oleh Hukumonline, adalah 6 April 2021 dan memiliki 357 Pasal yang mencakup 14 bab. Jika akhirnya disahkan oleh DPR, maka versi 2021 dari RUU ini akan mengizinkan semua Peraturan Perundang-Undangan yang ada yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata untuk tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuannya.

Tabel di bawah ini merangkum berbagai bidang subjek yang berpotensi disesuaikan berdasarkan RUU:

Hal yang Berkaitan dengan Gugatan, Permohonan Pendaftaran, Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan	Pemberian Kuasa Khusus	Wewenang Relatif dan Absolut Pengadilan
Pengunduran Diri dan Hak Ingkar	Upaya Menjamin Hak	Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Pemeriksaan dengan Acara Singkat	Pemeriksaan dengan Acara Cepat	Hal-Hal Pembuktian Persidangan
Putusan	Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan (yaitu Banding, Kasasi, Sengketa tentang Kewenangan Mengadili dan Peninjauan Kembali)	Pelaksanaan Putusan Pengadilan (yaitu Pelaksanaan dan Penahanan)

Selain berbagai penyesuaian untuk instrumen hukum yang berlaku sebelumnya, RUU ini juga menampilkan berbagai ketentuan baru (misalnya upaya hukum terkait putusan, pelaksanaan putusan pengadilan dan persidangan khusus). Dalam hal ini, pada umumnya RUU ini tampaknya mengandung ketentuan yang lebih ringkas dan bersifat langsung dibandingkan pendahulunya.

(lanjutan di halaman 52)

[6] ILO, "Maternity and paternity leave at work: Law and practice across the world – OVERVIEW" diakses melalui: https://ilo.org/global/publications/books/WCMS_242617/lang--en/index.htm pada tanggal 29 Desember 2023. | [7] Hukumonline.com, "Apa Kabar Perubahan Hukum Acara Perdata Nasional?", diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ae26a8dd27e/apa-kabar-perubahan-hukum-acara-perdata-nasional?page=all> pada tanggal 29 Desember 2023. | [8] Hukumonline.com, "RUU Hukum Acara Perdata Terdegradasi", diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f72f9fdbea08/ruu-hukum-acara-perdata-terdegradasi?page=all> pada tanggal 29 Desember 2023.

Perlu juga dicatat bahwa perubahan lebih lanjut pada RUU mungkin masih diperkenalkan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa para pelaku usaha untuk terus update sehubungan dengan pengembangan dan pengundangan RUU, mengingat akan cukup penting untuk setiap kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat dikenakan penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RUU ini, lihat ILD No. 776, ILD No. 777, ILD No. 778, ILD No. 735 dan ILD No. 736.

E. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Indonesia menandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang mengamanatkan pembentukan mekanisme yang mengizinkan non-conviction-based forfeiture ("NCB Forfeiture") diberlakukan di seluruh sistem hukum nasional. Namun, kerangka hukum Indonesia saat ini yang mengatur perampasan aset atas tindak pidana tertentu belum mengatur secara khusus mekanisme yang mengizinkan NCB Forfeiture.

RUU ini telah disusun sebagai bagian dari upaya yang bertujuan untuk memperbaiki situasi tersebut. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana terdiri dari 68 Pasal yang mencakup 17 bab yang secara khusus mengatur prasyarat NCB Forfeiture. Secara umum, RUU ini mengatur berbagai hal yang dirangkum di bawah ini:

Keadaan dan Kondisi yang Memperbolehkan Perampasan	Cakupan Aset yang Dapat Dirampas	Proses Perampasan
Pengajuan Keberatan	Pengelolaan Aset	Kerja Sama Internasional

Untuk memastikan pelaksanaan NCB Forfeiture yang tepat, mekanisme check and balance yang diberlakukan juga harus tepat dan memadai untuk mencegah dampak negatif pada sistem peradilan pidana sebagai akibat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Setelah diterapkan dengan benar, NCB Forfeiture tidak diragukan lagi akan menjadi senjata yang berguna dalam perjuangan berkelanjutan Indonesia melawan korupsi yang saat ini mengakar di negara ini.

Untuk rincian lebih lanjut mengenai RUU ini, lihat ILD No. 822.

II. 2024: Peraturan Pelaksana yang Ditunggu

A. Peraturan Pelaksana Peraturan yang Baru Diundangkan

Di ILD edisi sebelumnya, kami meng-highlight beberapa instrumen hukum yang baru diundangkan selama tahun 2023 dan yang mulai dari Peraturan Perundang-Undangan yang baru diperkenalkan hingga yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan instrumen hukum yang sudah ada.

(lanjutan di halaman 53)

Pengundangan berbagai instrumen hukum selama 2023, khususnya yang berbentuk Undang-Undang, tidak diragukan lagi akan memengaruhi arah lanskap peraturan selama tahun ini. Dalam hal ini, diharapkan sejumlah Peraturan Pelaksana baru dan penyesuaian terhadap Peraturan Pelaksana yang ada akan diperkenalkan sehubungan dengan Undang-Undang yang diterbitkan pada tahun 2023 untuk memastikan bahwa ketentuannya selaras dengan baik.

Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat berbagai potensi Peraturan yang akan datang berdasarkan Undang-Undang berikut yang diterbitkan selama tahun 2023:

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK")

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan")

KUHP

KUHP baru Indonesia yang telah lama ditunggu, yang akan mengganti pendahulunya yang berusia satu abad, telah berlaku pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP yang baru terdiri dari 624 Pasal yang mencakup 37 bab dan merevisi berbagai ketentuan yang semula tercantum dalam kerangka hukum sebelumnya melalui penghapusan, perumusan kembali, penambahan, dan memposisikan ulang berbagai unsur.

Setelah diundangkan, pelaksanaan ketentuan dalam KUHP akan dirinci dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang akan mengatur berbagai hal yang diuraikan di bawah ini:

Tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dapat menjadi dasar patut dipidana. [Pasal 2, KUHP]	Tata cara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun [Pasal 69, KUHP]
Tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan bagi terpidana. [Pasal 76, KUHP]	Tata cara pelaksanaan di situasi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 - Pasal 110. [Pasal 111, KUHP]
Pelaksanaan pidana dan tindakan kepada korporasi yang melakukan pidana korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 - Pasal 123. [Pasal 124, KUHP]	

Masih belum jelas apakah hal-hal yang tercantum di atas pada akhirnya akan diatur dalam serangkaian instrumen hukum yang berbeda, namun, dapat dipastikan bahwa Peraturannya akan diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai KUHP, lihat ILB No. 4422 dan ILD No. 799.

(lanjutan di halaman 54)

UU P2SK

UU P2SK telah berlaku sejak 12 Januari 2023, mengubah dan mencabut berbagai ketentuan yang semula tercantum dalam 15 UU yang sebelumnya berlaku di sektor keuangan. Namun, berbeda dengan KUHP yang hanya akan dirinci dalam bentuk Peraturan Pemerintah, ketentuan pelaksanaan UU P2SK akan berbeda-beda dari segi bentuk dan lembaga terkait.

Sebelum kita mendalami berbagai ketentuan UU P2SK, perlu diketahui bahwa Peraturan Pelaksana UU P2SK akan berbentuk berbagai jenis instrumen hukum, tergantung pada jenis hal yang sedang diatur. Tabel di bawah ini menampilkan peta Peraturan Pelaksana yang berlaku, serta beberapa hal yang kemungkinan akan diatur dalam bentuk Peraturan Pelaksana yang relevan:

Jenis Peraturan Pelaksana	Hal yang Akan Diatur
Peraturan Pemerintah	• Program Asuransi Wajib* • Stabilitas Sistem Keuangan* • Harmonisasi Program Pensiun • Penyelenggara Keuangan Berkelanjutan • Pelaporan Bersama Pelaporan Keuangan (Financial Reporting Single Window) • Penyelenggara Wali Amanat dan/atau Badan Pengelola Instrumen Keuangan • dll.
Peraturan Menteri Keuangan	• Persyaratan dan tata cara pengembangan dan pengawasan Profesi Penunjang Sektor Keuangan* • Persyaratan dan tata cara perizinan Profesi Penunjang Sektor Keuangan * • Penerapan Keuangan Berkelanjutan • dll.
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ["LPS"]	• Penyampaian data simpanan berbasis nasabah • Pembayaran klaim penjaminan • Syarat, mekanisme dan tata cara penanganan keberatan yang disampaikan nasabah penyimpan • Hal lain yang berkaitan dengan layanan simpanan • dll.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ["OJK"]	• Tata cara penunjukan Pengelola Statuter* • Pelaksanaan kewenangan baru OJK seperti kewenangan untuk memberi perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi usahanya* • Organisasi, tata kerja, dan anggaran Badan Supervisi OJK* • Tata cara penyelesaian pelanggaran melalui penyelesaian atas pelanggaran di sektor keuangan* • dll.

(lanjutan di halaman 55)

Jenis Peraturan Pelaksana	Hal yang Akan Diatur
Peraturan Bank Indonesia ["BI"]	• Pengendalian moneter • Pengelolaan lalu lintas valuta* • Kewenangan BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial* • Organisasi, tata kerja dan anggaran Badan Supervisi BI* • Penerbitan rupiah digital* • dll.
Peraturan Dewan Gubernur BI	• Kode Etik BI* • Laporan Kinerja Kelembagaan BI • Pengelolaan Aset BI • Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan internal dan kegiatan usaha BI
Peraturan Dewan Komisiner LPS	• Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan internal dan kegiatan usaha LPS
Peraturan Dewan Komisiner OJK	• Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan internal dan kegiatan usaha OJK
Peraturan pejabat, lembaga, dan lembaga lain yang bergerak di sektor keuangan, sesuai dengan kewenangan masing-masing	• Hal yang berkaitan dengan pasar modal, pasar uang dan pasar valuta asing • Perlindungan konsumen* • Otorisasi pemanfaatan LAPS-SK selama upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam sektor keuangan*

Perlu dicatat bahwa hal-hal yang lebih luas dari yang dirangkum di atas mungkin dapat diatur dalam Peraturan Pelaksana UU P2SK. Namun, hal-hal yang tercantum di atas, dan khususnya yang ditandai dengan tanda bintang (*), memiliki potensi yang lebih tinggi untuk diatur, mengingat bahwa hal-hal tersebut dapat mengalami perubahan besar berdasarkan UU P2SK atau baru diperkenalkan dalam UU P2SK.

Masih belum jelas apakah seluruh Peraturan Pelaksana UU P2SK akan diterbitkan sepanjang tahun 2024 atau tidak. Namun, perlu dicatat bahwa Peraturan Pelaksana tersebut tidak dapat diterbitkan dalam bentuk instrumen hukum yang baru diundangkan melainkan sebagai perubahan terhadap Peraturan sebelumnya yang membahas hal-hal serupa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UU P2SK, lihat ILD No. 793, ILD No. 794 dan ILB No. 4533.

UU Kesehatan

UU Kesehatan telah berlaku sejak 8 Agustus 2023 dan terdiri dari 458 Pasal yang mencakup 20 bab yang membahas berbagai aspek terkait kesehatan serta subsektor kesehatan yang relevan.

Karena luasnya cakupan hal yang dibahas dalam UU Kesehatan, diperkirakan Peraturan Pelaksana yang relevan akan berbentuk berbagai macam peraturan, tergantung pada aspek-aspek yang sedang diatur.

(lanjutan di halaman 56)

Tabel di bawah ini memetakan berbagai jenis Peraturan Pelaksana dan hal yang dapat diharapkan berdasarkan UU Kesehatan dalam waktu dekat:

Jenis Peraturan Pelaksana	Hal yang Akan Diatur
Peraturan Pemerintah	• Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ("TIK") sehubungan dengan upaya kesehatan • Laboratorium kesehatan • Pelayanan kesehatan dan hal-hal umum yang berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas kesehatan • Hal umum yang berkaitan dengan upaya kesehatan • Aborsi • Gizi • Penanganan penyakit menular dan tidak menular • Kesehatan lingkungan • Transplantasi organ • Pengamanan sediaan farmasi dan zat adiktif (misalnya hasil tembakau, rokok elektrik) • Pemanfaatan pelayanan medis untuk tujuan hukum • Pelayanan kesehatan tradisional • Penyelenggaraan layanan telemedicine • Kerahasiaan status kesehatan pasien • Segala hal yang berkaitan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan • Teknologi medis • Pengolahan data dan informasi kesehatan • dll.
Peraturan Presiden	• Pengelolaan Kesehatan • Koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan penguatan sistem pelayanan kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan	• Referensi individu layanan kesehatan • Hal yang berkaitan dengan imunisasi • Standar keamanan untuk pasien

Seperti yang terlihat di atas, ketentuan pelaksanaan UU Kesehatan diharapkan ada tiga bentuk, beberapa di antaranya mungkin telah dilaksanakan dan tidak akan mengalami perubahan lebih lanjut. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penyesuaian yang telah ditetapkan dalam UU Kesehatan.

Untuk saat ini, pemerintah sudah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan, yang akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai UU Kesehatan, lihat ILD No. 810 dan ILD No. 830.

B. Highlight RUU

Setelah ringkasan kami tentang potensi Peraturan yang akan datang berdasarkan Undang-Undang yang diundangkan selama tahun 2023, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bagian berikut meng-highlight berbagai Rancangan Peraturan yang dianalisis oleh Hukumonline sepanjang tahun 2023, sebagaimana tercantum di bawah ini:

(lanjutan di halaman 57)

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi ("RPP PDP")

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
("RPP Kesehatan")

Rancangan Peraturan OJK tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro
("RPOJK Keuangan Mikro")

Rancangan Peraturan OJK tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan
Permasalahan Bank Umum ("RPOJK Status Pengawasan")

Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum ("RPOJK Layanan Digital")

Rancangan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika tentang Etika Kecerdasan
Artifisial ("AI") ("Rancangan Surat Edaran Etika AI")

RPP PDP

Dalam hal pelaksanaan berbagai ketentuan yang semula diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 ("UU PDP") tentang Pelindungan Data Pribadi ("Data") ("PDP"), pemerintah akhirnya menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah ("RPP"), yang pada akhirnya akan menjadi Peraturan Pelaksana UU PDP.

RPP PDP terdiri dari 245 Pasal dan 10 bab yang membahas berbagai aspek luas yang khususnya berkaitan dengan PDP, sebagaimana dirangkum di bawah ini:

Pemrosesan Data
Ketentuan mengenai pemrosesan data meliputi pengaturan terkait pihak yang melakukan pemrosesan data dan pemasangan alat pengolah data visual
Hak dan Kewajiban
Ketentuan mengenai subjek ini meliputi pengaturan terkait persetujuan eksplisit, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kepentingan vital, pemrosesan secara terbatas dan spesifik, serta akurasi, kelengkapan dan konsistensi data, gugatan, dan keamanan data
Transfer Data di Luar Negeri
Ketentuan mengenai subjek ini meliputi pengaturan terkait pelindungan data yang setara atau lebih, pelindungan data yang memadai dan bersifat mengikat dan persetujuan untuk transfer data di luar negeri
Kewenangan Lembaga PDP
Ketentuan mengenai subjek ini meliputi pengaturan terkait pengawasan pengendali data, penjatuhan sanksi administratif, kerja sama dengan lembaga PDP di negara lain dan permintaan bantuan hukum

(lanjutan di halaman 58)

Sanksi Administratif
Ketentuan mengenai subjek meliputi pengaturan terkait jenis sanksi administratif, pejabat yang berwenang, investigasi awal, tindak lanjut investigasi dan pengenaan dan pelaksanaan keputusan
Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara
Ketentuan mengenai subjek ini meliputi pengaturan terkait pelaporan sengketa, upaya penyelesaian dan tata cara mediasi

RPP PDP adalah salah satu Rancangan Peraturan yang paling dinantikan dan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Sementara pengenalan UU PDP disambut positif oleh sebagian besar masyarakat, pihak tertentu yang terlibat dalam kegiatan pengolahan data, terutama pihak yang termasuk dalam kategori pengendali data dan pengolah data, telah menyatakan bahwa implementasi UU PDP menghadirkan berbagai tantangan karena kebaruan dan sifat mandat UU PDP tertentu yang tidak ditentukan.^[9] Dengan demikian, diharapkan RPP PDP pada akhirnya mampu menjawab tantangan yang ada.

Setelah diundangkan, harapannya adalah bahwa RPP PDP pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan terkait PDP di antara pengendali data dan pengolah data di seluruh negeri. Namun, dampak yang akan dihasilkan dari pengenalan RPP PDP akan bersifat multisektoral dalam lingkup dan akan mempengaruhi operasi semua bisnis yang terkait erat dengan data pribadi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RPP PDP, lihat ILD No. 537, ILD No. 538 dan ILB No. 4702.

RPP Kesehatan

Seperti disebutkan secara singkat di atas, setelah diundangkannya UU Kesehatan yang telah berlaku sejak 8 Agustus 2023, pemerintah saat ini sedang meletakkan dasar untuk diundangkannya RPP Kesehatan. Pada intinya, RPP Kesehatan mencakup berbagai langkah yang secara khusus berkaitan dengan implementasi UU 17/2023 dan terdiri dari total 1166 Pasal dan 13 bab, yang dibagi sebagai berikut:

Ketentuan Umum	Upaya kesehatan	Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan	Kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan	Sistem informasi kesehatan
Penyelenggaraan teknologi kesehatan	Penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah	Pendanaan kesehatan
Partisipasi masyarakat	Pembinaan dan pengawasan	Ketentuan peralihan dan ketentuan tertutup

(lanjutan di halaman 59)

[9] Hukumonline, "Tantangan Implementasi UU PDP", diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-implementasi-uu-pdp-lt632a9b0f04094/?page=all> pada tanggal 30 Desember 2023.

Meskipun jelas bahwa RPP Kesehatan akan memiliki dampak signifikan pada sektor kesehatan secara umum, sorotan publik saat ini diarahkan pada ketentuan yang secara khusus membahas zat adiktif dan rencana pembatasan penjualan produk yang mengandung zat adiktif, seperti hasil tembakau dan rokok elektrik.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) telah menyatakan keprihatinannya mengenai potensi dampak negatif dari ketentuan yang dimaksud, terutama yang berkaitan dengan media periklanan, pelaku ekonomi kreatif dan pelaku usaha yang beroperasi di industri hasil tembakau.^[10] Oleh karena itu, dari perdebatan yang sedang berlangsung saja, dapat diperkirakan bahwa RPP Kesehatan berpotensi memiliki dampak signifikan pada industri tembakau dan rokok.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RPP Kesehatan, lihat ILB No. 4730 dan ILD No. 543.

RPOJK Keuangan Mikro

Rancangan Peraturan ini ditetapkan menjadi salah satu Peraturan Pelaksana UU P2SK dan harus secara khusus memenuhi mandat untuk mengatur pengembangan dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro ("LKM").

RPOJK Keuangan Mikro terdiri dari lima buku yang telah dibagi menjadi 113 Pasal. Di bawah ini adalah berbagai hal yang patut di-highlight dalam Rancangan Peraturan ini:

Persyaratan perizinan berusaha LKM	Kewajiban yang baru diperkenalkan terkait sumber daya manusia dan susunan jabatan direktur LKM
Kewajiban internal dan pengenaan sanksi administratif kepada LKM	Kategorisasi LKM berdasarkan skala
Evaluasi kualitas kredit dan pendanaan	Rencana bisnis, good corporate governance, manajemen risiko dan strategi anti penipuan
Evaluasi tingkat kesehatan LKM	Kewajiban pelaporan keuangan

Setelah diundangkan, RPOJK Keuangan Mikro akan sekaligus mencabut dan mengganti beberapa peraturan OJK yang sebelumnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan mikro. Terlepas dari pencabutan yang akan datang, perlu dicatat bahwa sanksi administratif yang telah dikeluarkan berdasarkan salah satu peraturan yang tercantum di atas akan tetap efektif.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RPOJK Keuangan Mikro, lihat ILD No. 546.

(lanjutan di halaman 60)

[10] Medcom, "RPP UU Kesehatan Bisa Berdampak negative ke Ekonomi Kreatif, Kok Bisa?" diakses melalui: <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/9K5DwvIk-rpp-uu-kesehatan-bisa-berdampak-negatif-ke-ekonomi-kreatif-kok-bisa-pada> tanggal 30 Desember 2023.

RPOJK Status Pengawasan

Rancangan Peraturan ini juga ditetapkan menjadi salah satu Peraturan Pelaksana UU P2SK dan pada akhirnya akan membahas berbagai hal yang secara khusus berkaitan dengan penetapan status pengawasan dan penyelesaian masalah yang melibatkan bank umum ("Bank").

Rancangan Peraturan ini akan mengintegrasikan lima kerangka OJK yang berlaku saat ini ke dalam format buku (akibatnya mencabut dan mengganti kerangka tersebut ketika akhirnya mulai berlaku). RPOJK Status Pengawasan terdiri dari 147 Pasal dan tujuh buku, dengan buku pertama, keenam dan ketujuh masing-masing berisi ketentuan umum, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Ringkasan dari berbagai hal yang akan dibahas dalam Peraturan yang akan datang tercantum di bawah ini:

Buku Kedua: Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge	Buku Ketiga: Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Buku Keempat: Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	Buku Kelima: Bank Perantara

Perlu dicatat bahwa Rancangan Peraturan ini membuat sejumlah penyesuaian penting terhadap klasifikasi status pengawasan dan pengenaan sanksi administratif pada Bank yang tidak memenuhi kewajiban yang relevan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai this Rancangan Peraturan, lihat ILB No. 4718.

RPOJK Layanan Digital

Rancangan Peraturan ini bertujuan untuk lebih mengakomodasi berbagai hal terkait layanan digital yang disediakan oleh Bank dan/atau Bank bersama dengan mitra terkait, termasuk layanan yang ditawarkan oleh Bank melalui pemanfaatan teknologi informasi ("TI") dan media elektronik kepada nasabah dan/atau calon nasabah sehubungan dengan produk perbankan.

Setelah berlaku, Rancangan Peraturan akan mencabut dan menggantikan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Yang di-highlight di tabel di bawah ini adalah berbagai ketentuan baru yang akan diperkenalkan dalam RPOJK Layanan Digital:

Akomodasi perkembangan digital lebih lanjut	Perlindungan nasabah dan perlindungan data pribadi
Kewajiban pelaporan	Sanksi yang berlaku

(lanjutan di halaman 61)

Rancangan Peraturan ini tentunya akan berdampak pada Bank yang menyediakan layanan digital. Meskipun jelas bahwa ketentuan tertentu dari Peraturan yang akan datang akan memungkinkan pemanfaatan teknologi baru, termasuk AI, Bank juga harus memastikan implementasi yang bertanggung jawab dari teknologi tersebut melalui proses kepatuhan, pemantauan, dan manajemen risiko.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Rancangan Peraturan ini, lihat ILB No. 4661.

Rancangan Surat Edaran Etika AI

Pada tahun 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika mengakui penggunaan AI dengan memasukkan kegiatan pemrograman berbasis AI dalam kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 62015.

Mengingat peningkatan adopsi AI yang signifikan di berbagai industri, Rancangan Surat Edaran ini telah disusun untuk dijadikan acuan untuk digunakan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kategori KBLI 62015 tersebut dalam kaitannya dengan jenis kegiatan berikut:

1. Perumusan dan pembuatan kebijakan internal perusahaan terkait data dan etika internal AI; dan
2. Pelaksanaan konsultasi, analisis, dan pemrograman yang berbasis AI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Sementara Rancangan Surat Edaran membahas enam bentuk nilai AI etis, perlu juga disoroti bahwa berbagai tanggung jawab harus diperhatikan selama pemanfaatan AI, seperti yang dirangkum di bawah ini:

Perlindungan kepada masyarakat dalam pemanfaatan AI, khususnya terakhir dengan penggunaan data pribadi	Memastikan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan eksistensi manusia
Mencegah adanya rasisme dan segala bentuk tindakan yang merugikan manusia	Pemanfaatan teknologi AI harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dan pemecahan masalah
Implementasi regulasi pemanfaatan AI harus dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan dan ketentrangan pengguna di media digital	Pengembang teknologi berbasis AI harus memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengembangannya dan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan
Strategi manajemen risiko harus dibuat untuk memastikan keamanan pengguna serta mitigasi adanya bencana dalam pemanfaatan teknologi AI	

Meskipun Rancangan Surat Edaran tidak menetapkan sanksi apa pun yang secara khusus terkait dengan ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab yang diuraikan di atas, penting bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk mengetahui ketentuan-ketentuan ini dan menggunakannya sebagai bentuk pedoman normatif, sebagaimana disediakan oleh pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Rancangan Surat Edaran, lihat ILB No. 4773.



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Tata Cara Mendaftar

Kadin for Naker

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik



WIKI WIRAUSAHA

Platform digital yang berfungsi sebagai wadah bagi UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung UMKM Indonesia untuk naik kelas

Akses pasar

Akses keuangan

Pelatihan

Kemitraan inklusif

Direktori UMKM



Banyak sekali ilmu dan skill yang saya dapatkan setelah mengikuti program ini. Materinya mudah untuk dipahami, sehingga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari bahkan di bisnis yang saya geluti selama ini.

Achmad Muzamil

Pengusaha asal Wonosobo

Mari bergabung dan tampilkan profil perusahaan anda agar terhubung dengan berbagai calon Mitra Perusahaan atau UMKM lainnya.



wikiwirusaha.id

Daftar ke:

wikiwirusaha@kadin.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi **Help desk**:

☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)





Kadin Indonesia mengucapkan

Selamat
Tahun Baru
2024

Mari kita sambut Tahun Baru 2024 dengan harapan dan semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih baik.



kadin.indonesia.official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



www.kadin.id

**KADIN INDONESIA**

Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id**WIKI WIRUSAHA**

Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirusaha.id

Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id

Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id

Kembangkan kapasitas dan kesempatan meningkatkan jenjang karir di sini:

kadinforaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484